



INDIKATOR MAKRO

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2011



BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BADUNG**

INDIKATOR MAKRO
KABUPATEN BADUNG 2011

ISBN : -
No. Publikasi : 51032.12.04
Katalog BPS : 9201005.5103
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 90 + viii halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Penyunting : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jln. Mulawarman No. 11, Telp (0361) 437519, Fax (0361) 411887,

Denpasar 80111

E-mail : bps5103@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Om Swastyastu,

Puji Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, publikasi Indikator Makro Kabupaten Badung Tahun 2011 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Hasil publikasi ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengetahui gambaran umum kondisi makro sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung pada tahun 2011. Melalui ketersediaan data indikator ekonomi makro maka diharapkan mampu dihasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif dan efisien sesuai potensi dan kondisi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi selama proses penyusunan publikasi Indikator Makro Kabupaten Badung Tahun 2011. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Badung.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Mangupura, Oktober 2012
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Badung



I Wayan Suambara, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631025 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya penyusunan publikasi **Indikator Makro Kabupaten Badung Tahun 2011** telah dapat diselesaikan tepat waktu.

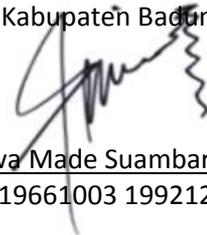
Publikasi ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran umum kondisi makro sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung pada tahun 2011 sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung.

Disadari masih terjadi beberapa kelemahan dalam analisa data karena kurang mendalamnya analisis yang ada, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan ke depan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Badung, Oktober 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung



Ir. Dewa Made Suambara, MMA
NIP. 19661003 199212 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Badung	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Sumber Data	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Kerangka Sampel	5
2.2. Rancangan Sampel	5
2.3. Metode Pengumpulan Data	6
2.4. Konsep Definisi	7
BAB III KONSEPSI TEORITIS	11
3.1. Pembangunan dan Ketimpangan	11
3.2. Penyebab Ketimpangan Pendapatan	16
3.3. Indikator Ketimpangan	19
3.4. Kemiskinan	23

3.5. Ketenagakerjaan	26
3.6. Pembangunan Manusia	28
BAB IV PENDUDUK DAN TENAGA KERJA	32
4.1. Kondisi Kependudukan	32
4.2. Gambaran Umum Ketenagakerjaan	35
4.3. Profil Pekerja	37
4.4. Profil Pengangguran	43
BAB V PEMBANGUNAN MANUSIA	45
5.1. Angka Harapan Hidup	48
5.2. Angka Melek Huruf	50
5.3. Rata-Rata Lama Sekolah	51
5.4. Daya Beli Masyarakat	53
5.5. Indeks Pembangunan Manusia	56
BAB VI DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN	60
6.1. Ketimpangan Pendapatan	62
6.2. Kemiskinan	66
BAB VII POLA KONSUMSI	70
7.1. Konsumsi Perkapita	70
7.2. Pola Konsumsi.....	73
7.2.1. Pola Konsumsi Makanan	78
7.2.2. Pola Konsumsi Non Makanan	83
BAB VIII KESIMPULAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, Tahun 2007-2011	36
Tabel 2.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota, 2005 – 2011.....	58
Tabel 3.	Distribusi Ukuran Untuk Masing-Masing Desil Pendapatan Kabupaten Badung, 2006-2011.....	62
Tabel 4.	Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Badung, 2006-2011.....	63
Tabel 5.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab.Badung (000 Rp) Menurut Klasifikasi Daerah, Inflasi, dan PDRB Perkapita, Tahun 2008 – 2010	72
Tabel 6.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2011 .	78
Tabel 7.	Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2011	81
Tabel 8.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006 -2011.....	82
Tabel 9.	Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2011.....	85
Tabel 10.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006, 2009 dan 2011.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kurva Lorenz.....	23
Gambar 2.	Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan, 2011	33
Gambar 3.	Piramida Penduduk Kab. Badung, 2011.....	34
Gambar 4.	Penduduk Kabupaten Badung Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2011	38
Gambar 5.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha, Kabupaten Badung, 2011	39
Gambar 6.	Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Kabupaten Badung, 2011	40
Gambar 7.	Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Kabupaten Badung, 2011	41
Gambar 8.	Jumlah Pekerja Menurut Statusnya, Kabupaten Badung, 2011	42
Gambar 9.	Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan, 2011	44
Gambar 10.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung, 2005-2011	49
Gambar 11.	Angka Melek Huruf Kabupaten Badung, 2005-2011.....	51
Gambar 12.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Badung, 2005-2011....	52
Gambar 13.	Daya Beli Masyarakat Kabupaten Badung, 2005-2011.....	54
Gambar 14.	Daya Beli Masyarakat Kabupaten Badung, 2005-2011.....	57
Gambar 15.	Kurva Lorenz Kabupaten Badung, 2009-2011.....	64
Gambar 16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan <i>Gini Ratio</i> Kabupaten Badung, 2008-2011	65
Gambar 17.	Perkembangan Kemiskinan Kab. Badung 2005 - 2011.....	67
Gambar 18.	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Badung, 2008-2011	68

Gambar 19.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran, 2006-2011	74
Gambar 20.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelas Pengeluaran (000 rupiah), 2011	77
Gambar 21.	Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan, 2011	79
Gambar 22.	Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan, 2011	84

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya pembangunan nasional diarahkan dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan dalam berbagai dimensi dan aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan mampu meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Pembangunan nasional tentunya selaras dan sinkron dengan pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral pelaksanaan pembangunan nasional.

Peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah ketenagakerjaan masih menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan pembangunan di semua negara terutama negara-negara yang sedang berkembang. Berbagai langkah telah dilakukan dalam upaya meminimalisir kesenjangan pendapatan dan kemiskinan serta mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah senantiasa mengupayakan pemerataan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan finansial yang ada untuk memperkuat daya saing wilayah sehingga hasil-hasil pembangunan yang dicapai diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru diharapkan

mampu mendukung sektor-sektor ekonomi yang telah berkembang dengan pemererat keterkaitan antar sektor secara menyeluruh.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, dikembangkan berbagai indikator. Salah satunya adalah indikator ketimpangan pendapatan seperti *Gini Ratio*, distribusi ukuran maupun kurva lorenz. Mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan pendapatan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang semakin tinggi pula. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Menurut (Ernest Engel), "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan.

Selain ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran juga menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan diharapkan mampu menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja lokal sehingga dapat memperkuat perekonomian wilayah itu sendiri karena tidak tergantung dengan tenaga kerja dari luar. Tentunya hal ini juga harus diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan

pasar kerja. Oleh karena itu indikator-indikator ketenagakerjaan yang digunakan juga harus dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas tenaga kerja salah satunya dari tingkat pendidikannya. Melalui gambaran tersebut pemerintah dapat membuat perencanaan dan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menjadi hal yang sangat *urgent* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan manusia saja namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas manusia itu sendiri.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kajian ini dibuat dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum kondisi makro sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung pada tahun 2011. Adapun tujuannya untuk mengungkapkan beberapa indikator ekonomi makro sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung. Secara spesifik publikasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Mengetahui gambaran kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Badung pada tahun 2011.
- b. Mengetahui pencapaian hasil pembangunan manusia di Kabupaten Badung hingga tahun 2011.
- c. Mengetahui kesenjangan pendapatan serta kondisi kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2011.
- d. Mengetahui pola konsumsi penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2011.

1.3.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2011 yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari kedua survei ini dapat digunakan untuk estimasi hingga level Kabupaten/Kota. Di Badung sebanyak 649 rumah tangga yang dilibatkan menjadi responden Susenas, dan 416 rumah tangga sebagai responden Sakernas.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas dan Sakernas 2011 terdiri dari dua jenis, yaitu: kerangka pemilihan sampel primer (*primary sampling unit*) dan kerangka pemilihan sampel sekunder (*secondary sampling unit*). Kerangka pemilihan sampel primer adalah daftar blok sensus biasa (BS) hasil pemetaan dalam rangka persiapan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang didokumentasikan dalam Daftar SP2010-RD. Informasi yang digunakan untuk melengkapi kerangka sampel adalah banyaknya kepala keluarga (KK), dan muatan blok sensus dominan (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh). Selain itu, kerangka sampel juga dilengkapi dengan klasifikasi desa/kelurahan, yaitu: daerah perkotaan (*urban*) dan daerah perdesaan (*rural*). Klasifikasi desa/kelurahan yang digunakan adalah klasifikasi desa/kelurahan tahun 2010. Kerangka pemilihan sampel sekunder adalah daftar rumah tangga biasa hasil listing SP2010 dalam blok sensus.

2.2. Rancangan Sampel

Rancangan penarikan sampel Susenas 2010 adalah rancangan penarikan sampel dua tahap berstrata. Yang sebagai strata adalah klasifikasi desa/kelurahan, yaitu: desa/kelurahan perkotaan (*urban*) dan desa/kelurahan perdesaan (*rural*). Ukuran sampel yang telah ditetapkan ditujukan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Penarikan sampel antar strata dilakukan secara terpisah (*independent*). Sebelum penarikan

sampel, blok sensus diurutkan menurut muatan dominan blok sensus, yaitu pemukiman bias, mewah dan kumuh.

Prosedur penarikan sampel Susenas 2011 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama, memilih n_h blok sensus dari N_h secara pps (*probability proportional to size*) dengan *size* banyaknya KK.

b. Tahap kedua, memilih sejumlah rumah tangga biasa ($m = 16$) pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis berdasarkan hasil listing SP2010. Seluruh rumah tangga terpilih Susenas 2010 akan dicacah dengan kuesioner KOR (Daftar VSEN2011.K).

Untuk kegiatan Sakernas dilakukan pembentukan paket-paket blok sensus. Blok sensus dalam kerangka sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dibagi menjadi empat gugus sampel blok sensus yang berukuran sama dan tidak saling tumpang tindih (*non overleaping*) secara sistematis yang digunakan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Februari setiap tahunnya, sedangkan kelompok blok sensus komplemen dibagi menjadi dua paket sampel yang digunakan sebagai blok sensus tambahan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Pembentukan gugus sampel blok sensus antara daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah (*independent*). Pemutakhiran daftar rumah tangga (*update listing*) dilakukan di setiap periode pencacahan yang dilanjutkan dengan pemilihan rumah tangga sampel.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dibedakan menjadi

dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan tentang rumahtangga kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya, dan tahap kedua menanyakan keterangan individu kepada masing-masing anggota rumah tangga.

2.4.Konsep Definisi

- a. Koefisien Gini/*Gini Ratio* adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat/bangsa atau suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan di suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah nilai *gini ratio* maka semakin merata pula distribusi pendapatannya.
- b. Kurva *Lorenz* didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumahtangga/penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
- c. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
- d. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- e. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- f. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak putus) dalam

seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

- g. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja dan sebagainya.
- h. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*An ILO Manual on Concepts and Methods*).
- i. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.
- j. Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
- k. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
- l. Setengah penganggur terpaksa adalah setengah pengangguran yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- m. Setengah penganggur sukarela adalah setengah pengangguran tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

- n. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
- o. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- p. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu, dsb) yang tidak melakukan suatu pekerjaan seminggu yang lalu.
- q. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu.
- r. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2005).
- s. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI 2002) yang mengacu pada ISCO 88.
- t. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit/kegiatan, yang dibedakan menjadi 7 kategori:
 - Berusaha sendiri adalah bekerja/berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam

rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja/berusaha resiko sendiri dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

BAB III

KONSEPSI TEORITIS

3.1. Pembangunan dan Ketimpangan

Para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai pembangunan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per-ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Secara tradisional, pembangunan difokuskan sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun kemudian muncul sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita (*income per capita*). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan

ekonomi tradisional. Para ekonom modern mulai mempertanyakan apakah semua indikator ekonomi yang ada dapat menggambarkan tingkat kemakmuran. Mereka mulai mengedepankan penurunan tahta pertumbuhan ekonomi (*dethronement of GNP*), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada karena pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Hal ini membawa perubahan dalam paradigma menyoroti pembangunan yaitu bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, -2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

- a. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

- c. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Masih menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Hasil-hasil penelitian pertama mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Prof. Simon Kuznets dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut yang digambarkan melalui kurva U terbalik (*inverted U curve*).

Todaro (2000) mengatakan meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistis yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik dalam dasawarsa yang lalu, akan terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi persentase penduduk miskin namun di lain pihak sebagian penduduk miskin menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu

pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya

Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengharuskan kita untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri maju. Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) dalam Tambunan (2001) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu kecenderungan peningkatan selama dekade 1970 dan 1980-an. Dari studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

3.2. Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, yaitu:

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi yang menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita;
- b. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
- d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
- e. Rendahnya mobilitas sosial;
- f. Kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
- g. Nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang;
- h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

(Procovitch) pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan

kotadesa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovits pada tahun 1955 dikembangkan oleh Kuznets, yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesa Kuznets, yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

(Chiswick) menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya ; sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Mengingat demikian luasnya ruang lingkup yang mencakup berbagai kemungkinan faktor penyebab ketidakmerataan pembagian pendapatan. Esmara Hendra (1976) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembagian pendapatan tidak seluruhnya dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi faktor-faktor kualitatif yang terdapat di dalamnya juga sangat penting. Keseluruhan faktor tersebut biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu : (1) aspek ekonomi makro, yang mencakup struktur perekonomian suatu negara. Kerangka ini biasanya memperhatikan aspek-aspek pertanian dan non pertanian kota dan pedesaan, tingkat pembangunan daerah, kesempatan kerja, dan kekayaan. (2) Aspek ekonomi mikro yang mencoba menjelaskan ketimpangan pembagian pendapatan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut seperti umur, pendidikan, lamanya hari kerja, jabatan, dan sebagainya.

Sigit Hananto (1980) menambahkan bahwa perubahan pembagian pendapatan juga disebabkan karena adanya perbedaan status tenaga kerja, seperti ada pengusaha, buruh, pegawai, pekerja sendiri, dan ada pula pekerja keluarga. Perbedaan status tenaga kerja inilah yang mengakibatkan pergeseran pembagian pendapatan dalam suatu sektor ekonomi. Perbedaan antar sektor sebenarnya dapat diterima, karena mau tak mau pasti terjadi perbedaan pertumbuhan produk antar sektor, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ditekankan agar perbedaan antar status tenaga kerja dalam suatu sektor dijaga jangan sampai semakin melebar.

3.3. Indikator Ketimpangan

a. Distribusi Ukuran

Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan. Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (*quintiles*) atau sepuluh kelompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya dihitung berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.

b. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: pertama; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kedua; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, ketiga; 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

1. Apabila 40% penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
2. Apabila 40% penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima antara 12% sampai 17% jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
3. Apabila 40% penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

c. Koefisien Gini

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Nilai *gini ratio* berkisar antara nol dan satu. Bila *gini ratio* sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun bila *gini ratiosama* dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusi

pendapatannya. Pada prakteknya nilai *Gini Ratio* berkisar 0,50 – 0,70 dikategorikan ketimpangan tajam, sedangkan nilai *Gini Ratio* berkisar 0,20 – 0,35 ketimpangan relatif baik (merata).

Rumus untuk menghitung *Gini Ratio* adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :

G = *Gini ratio*

P_i = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-(i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan.

Kelebihan *Gini Ratio* sebagai ukuran ketidakmerataan:

1. *Gini Ratio* menunjukkan ukuran ketidaksetaraan melalui sebuah alat analisis rasio, daripada variabel tidak representatif dari sebagian besar masyarakat, seperti pendapatan per kapita atau produk domestik bruto.
2. Dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor maupun negara, misalnya *Gini Ratio* untuk daerah perkotaan yang berbeda dari daerah pedesaan di banyak negara (walaupun di negara Amerika Serikat nilai *Gini Ratio* di wilayah perkotaan dan pedesaan hampir sama).
3. *Gini Ratio* dapat membandingkan lintas daerah atau lintas negara dan mudah diinterpretasikan. PDB statistik sering dikritik karena

tidak mewakili perubahan bagi seluruh penduduk. *Gini Ratio* akan menunjukkan seberapa besar pendapatan perkapita ternyata mengalami ketimpangan. Jadi meskipun pendapatan perkapita naik, namun apabila *Gini Ratio* masih tinggi artinya kemiskinan bisa jadi masih ada dalam masyarakat

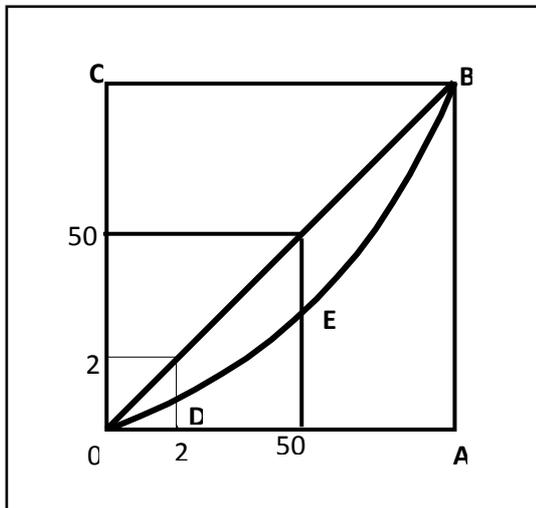
4. *Gini Ratio* yang dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan telah berubah dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga sangat mungkin untuk melihat apakah ketidakmerataan meningkat atau menurun.

d. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik. Sumbu horizontal menyatakan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif. Misalnya, pada titik 20 kita mendapati populasi atau kelompok terendah (penduduk yang paling miskin) yang jumlahnya meliputi 20 persen dari jumlah total penduduk. Pada titik 60 terdapat 60 persen kelompok bawah, demikian seterusnya sampai pada sumbu yang paling ujung yang meliputi 100 persen atau seluruh populasi atau jumlah penduduk. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut. Sumbu tersebut juga berakhir pada titik 100 persen, sehingga kedua sumbu (vertikal dan horisontal) sama panjangnya. Garis diagonal merupakan garis "pemerataan sempurna" (*perfect equality*) dalam distribusi ukuran

pendapatan. Persentase pendapatan yang ditunjukkan oleh titik-titik di sepanjang garis diagonal tersebut persis sama dengan persentase penduduk penerimanya terhadap total penduduk.

Gambar 1. Kurva Lorenz



OC = Persentase kumulatif pendapatan

OA = Persentase kumulatif penduduk

OB = Diagonal Gini

D = menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 8 persen pendapatan.

Idealnya adalah 20 persen, demikian pula E identik dengan

D. Makin jauh garis ODEB dari diagonal OB makin senjang tingkat pendapatan.

3.4. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya dan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

a. Jenis Kemiskinan

Selama ini dikenal beberapa jenis kemiskinan diantaranya adalah kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Terkadang kita tertarik untuk menekankan perhatian kita khusus pada golongan penduduk termiskin (misalnya 20 persen atau 40 persen dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran); kelompok ini merupakan penduduk yang relatif miskin. Bila mendefinisikan dengan cara ini, maka tak dapat disangkal lagi bahwa “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Ukuran atau definisi tersebut dapat membantu kita untuk menentukan program sasaran yang ditujukan untuk membantu penduduk miskin. Biasanya kemiskinan secara relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok/dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibentuk dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makannya selama sebulan. Kebutuhan minimum makanan ini setara

dengan pemenuhan kebutuhan 2100 kkal/kapita/hari yang diwakili oleh nilai konsumsi 52 jenis komoditi bahan makanan. Sementara itu garis kemiskinan non makanan merupakan nilai rupiah minimum untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan maupun transportasi yang diwakili oleh nilai konsumsi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

b. Indikator Kemiskinan

Beberapa indikator kemiskinan yang lazim digunakan adalah:

1. *Headcount Index* (P_0), merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Semakin besar nilai P_0 berarti semakin besar persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gaps Index*/ P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Melalui indeks kedalaman kemiskinan, Pemerintah dapat memperkirakan besarnya dan minimal yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dengan catatan bahwa dana tersebut dialokasikan secara sempurna terhadap penduduk yang menjadi target pengentasan kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/ P_2). Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.5.Ketenagakerjaan

Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak dan bebas menentukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Namun demikian tidaklah semudah seperti apa yang diinginkan, bahwa setiap warga negara pasti akan memperoleh pekerjaan seperti yang diinginkan. Mendapat kesempatan untuk bekerja (*demand for labour*) yang diartikan lowongan pekerjaan merupakan dambaan bagi setiap orang yang hendak bekerja, karena orang yang bekerja berarti mempunyai penghasilan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan. Sebagai subyek, jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pasokan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masalah kelangkaan kesempatan kerja masih seringkali terjadi terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi yang terjadi ternyata tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Kesenjangan inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya perlindungan hukum, upah yang kurang layak, faktor eksternal (contoh: krisis global), serta rendahnya kreativitas dan inovasi.

Masalah ketenagakerjaan di negara berkembang ternyata mempunyai dampak dan implikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan di negara-negara maju diantaranya kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dengan berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah ketenakerjaan ini.

Kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki karakteristik yang unik diantaranya adanya pengangguran di kalangan orang-orang berpendidikan. Hal ini terjadi karena bagi mereka yang tidak berpendidikan rela melakukan pekerjaan apa pun demi mendapatkan sesuap nasi. Sebaliknya mereka yang berpendidikan hanya bersedia bekerja jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang, status atau kepuasan yang relatif tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan semakin tinggi pendidikan semakin besar peluangnya untuk menganggur.

Di sisi lain ketidakmampuan para pengusaha (karena skala bisnisnya sangat terbatas) mendorong mereka menjadi pekerja mandiri (menciptakan lapangan kerjanya sendiri). Pekerja mandiri di negara-negara berkembang biasanya merupakan pedagang asongan, pemilik warung kecil, tukang semir sepatu, pengamen, penarik becak maupun perajin kaki lima yang semata-mata hanya berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak optimal. Mereka inilah yang digolongkan sebagai setengah pengangguran. Berbeda dengan di negara-negara maju dimana pekerja mandiri umumnya merupakan pemilik perusahaan kecil, mitra dalam

sebuah firma maupun tenaga profesional seperti pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja juga menimbulkan masalah sendiri, karena kebanyakan dari mereka hanya bekerja di tempat yang tidak banyak menghasilkan pendapatan bahkan tidak dibayar sama sekali karena hanya terpusat di sektor pertanian maupun kegiatan informal lainnya. Kaum wanita hampir selalu mengalami diskriminasi dalam hal perolehan imbalan, peningkatan kelas pekerjaan maupun keamanan kerja. Selain itu proporsi wanita yang menganggur juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tingginya tingkat pengangguran di usia muda terutama di kalangan wanita juga menimbulkan masalah tersendiri. Lebih dari 30 persen pengangguran merupakan pemuda. Hal ini umumnya terjadi di daerah-daerah perkotaan. Banyak diantaranya yang merupakan migran dari perdesaan yang mengharapkan mendapat pekerjaan yang layak di kota. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan proporsi pemuda terhadap total penduduk menjadi besar yang tentunya menambah tekanan terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

3.6. Pembangunan Manusia

Secara konseptual, IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari

pemerintahan suatu wilayah negara, propinsi atau kabupaten/kota (UNDP, 1990; BPS, 1997).

Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan UNDP, IPM menjadi salah satu indikator pembangunan yang penting di Indonesia. Di tingkat internasional IPM dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. Laporan ini mengambil pola yang sama dengan publikasi UNDP yang berjudul "Human Development Report", terutama konsep dan definisi, serta metodologi yang digunakan. Untuk tingkat nasional IPM dipergunakan sebagai tolok ukur antar propinsi dan di tingkat propinsi dipakai sebagai perbandingan antar kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas bahwa IPM sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. IPM juga bisa dipakai sebagai alat pemantau dan bisa dimanfaatkan dalam manajemen pembangunan karena bisa membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Pada level daerah IPM sebagai salah satu ukuran dampak pembangunan dimanfaatkan sebagai acuan oleh pihak berwenang setempat, terutama Pemda, dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemanfaatan ini merupakan bagian dari instrumen makro perencanaan pembangunan daerah dan untuk monitoring serta evaluasi suatu wilayah dalam lingkungan propinsi. IPM dan komponen-komponen penyusun IPM

bisa dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah.

Seperti indeks komposit lainnya, IPM memiliki beberapa keterbatasan. Hal tersebut perlu dipahami untuk menghindari kesalahan pada penggunaan indeks tersebut. Dengan memahami keterbatasan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan untuk pengembangan ketersediaan dan reliabilitas data serta untuk melakukan monitoring perkembangan pembangunan manusia. Adapun keterbatasan IPM antara lain:

- a. IPM bukan merupakan suatu ukuran yang komprehensif mengenai pembangunan manusia. Indeks tersebut hanya mencakup tiga aspek dari pembangunan manusia, tidak termasuk aspek penghargaan diri, kebebasan politik dan masalah lingkungan. IPM kurang dapat merefleksikan pencapaian sasaran program yang lebih berdimensi pemberdayaan manusia yang mendasar.
- b. IPM tidak dapat digunakan untuk menilai perkembangan manusia dalam jangka pendek, karena dua komponennya yaitu angka melek huruf dan angka harapan hidup, tidak responsif terhadap kebijakan dalam jangka pendek.
- c. IPM memasukkan variasi pembangunan dalam suatu wilayah. Ini berarti IPM yang sama dari dua wilayah tidak mengindikasikan bahwa kedua wilayah tersebut memiliki pembangunan manusia yang identik. Dengan kata lain, mungkin saja terdapat perbedaan bagaimana pembangunan manusia didistribusikan antar sub wilayah antar kelompok sosial.

- d. IPM tidak menyatakan besaran apa-apa, kecuali perbandingan antar wilayah dan antar waktu. Oleh karena itu analisis yang bisa dilakukan selalu memakai kerangka keterbandingan antar waktu dan daerah. Untuk mengatasi kelemahan ini, laporan analisis yang disajikan dalam publikasi ini menyertakan pembahasan komponen IPM secara tersendiri maupun hubungannya dengan variabel sosial ekonomi.
- e. IPM sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran (*raising awareness*) bagi perumus dan pengambil kebijakan pembangunan dan dapat dipakai untuk alat perencanaan bila didukung oleh indikator tunggal lainnya dari berbagai sektor pembangunan.

Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam merepresentasikan pembangunan manusia, IPM dapat diterima secara luas sebagai ukuran pembangunan manusia karena beberapa alasan berikut ini:

- a. IPM menerjemahkan secara sederhana konsep yang cukup kompleks ke dalam tiga dimensi dasar yang terukur.
- b. IPM membantu pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi menjadi pembangunan yang berfokus pada manusia.
- c. IPM berfokus pada kapabilitas yang relevan, baik untuk negara maju dan berkembang, sehingga menjadikan indeks tersebut sebagai alat yang universal.
- d. IPM menstimulasi diskusi mengenai pembangunan manusia.
- e. IPM memberikan motivasi bagi pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dengan negara/wilayah lain melalui keterbandingan angka IPM.

BAB IV

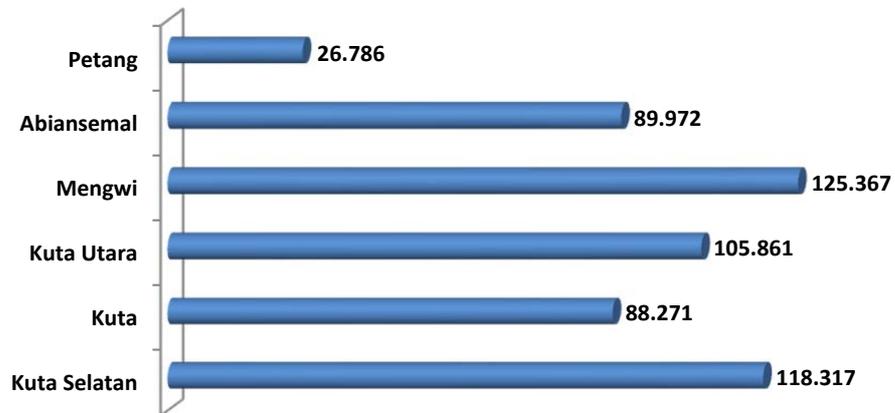
PENDUDUK DAN TENAGAKERJA

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk ibarat pisau bermata dua dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dalam pembangunan jika dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas dan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas justru hanya akan menjadi beban pembangunan dengan munculnya berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan berujung pada keamanan.

4.1. Kondisi Kependudukan

Pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Badung berjumlah 554.574 jiwa. Lebih dari separuh penduduk terkonsentrasi di wilayah Badung Selatan yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Badung Selatan merupakan pusat kegiatan ekonomi yang sebagian besar bertumpu pada sektor pariwisata. Sementara penduduk di wilayah Badung Utara lebih banyak bergerak di sektor pertanian.

Gambar 2.
Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan, 2011



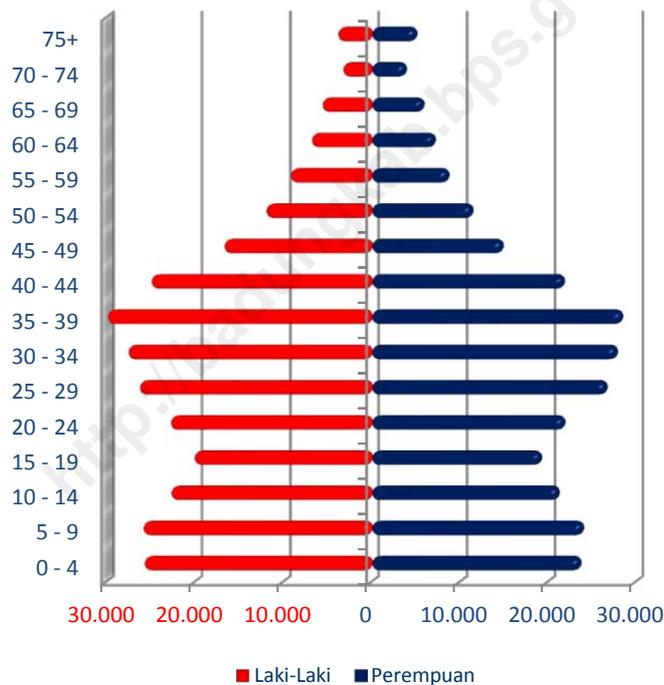
Sumber: Estimasi Berdasarkan Hasil SP2010

Persebaran penduduk yang tidak merata tersebut membawa dampak terhadap tidak meratanya kepadatan penduduk. Kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya, kemudian disusul oleh Kecamatan Kuta Utara. Perluasan wilayah pemukiman saat ini mulai merambah ke wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Wilayah ini menjadi wilayah tujuan untuk tempat tinggal karena lokasinya yang tidak jauh dari pusat kegiatan ekonomi namun secara geografis wilayahnya belum sepadat Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Utara. Di sisi lain wilayah Badung Utara masih sangat lengang. Luasnya yang mencapai 63,56 persen dari total luas Kabupaten Badung hanya didiami oleh 43,66 persen penduduk. Apalagi Kecamatan Petang yang kepadatannya hanya 232,92 jiwa/km². Tentunya dengan memperhatikan distribusi dan kepadatan penduduk yang tidak merata diperlukan kebijakan tersendiri untuk lebih

mengoptimalkan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah Badung Utara dan Badung Selatan.

Karakteristik demografi suatu wilayah juga bisa dilihat dari struktur umurnya. Dari kajian mengenai struktur umur penduduk dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2011 nilai rasio ketergantungan di Kabupaten Badung sebesar 44,44. Dapat diinterpretasikan bahwa 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif.

Gambar 3.
Piramida Penduduk Kab. Badung, 2011



Sumber: Estimasi Berdasarkan Hasil SP2010

Dari gambar piramida penduduk di atas dapat dilihat jelas komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur. Piramida penduduk Kabupaten Badung dapat dikategorikan sebagai tipe *expansive* dimana sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kelompok umur muda. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Dasar piramida yang lebar mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran serta besarnya rasio ketergantungan penduduk usia muda. Jumlah penduduk di kelompok 0-4 yang relatif mirip polanya dengan kelompok umur 5-9 menunjukkan tingkat fertilitas dalam 10 tahun terakhir cenderung stabil. Sementara puncak piramida yang menciut menggambarkan masih tingginya angka kematian serta rendahnya rasio ketergantungan penduduk usia tua. Dari kondisi ini hendaknya pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan untuk mengaktifkan upaya-upaya penurunan fertilitas dan memperbaiki kualitas kesehatan sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian.

4.2. Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Berdasarkan konsep yang digunakan oleh *International Labour Organization/ILO* (Organisasi Buruh Internasional), BPS membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) menurut kegiatan utamanya menjadi dua, yaitu angkatan kerja (*economically active*) dan bukan angkatan kerja (*non economically active*). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

**Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung,
Tahun 2007 – 2011**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
Penduduk Usia Kerja (000 org)	304.38	310.22	317.06	409.76	409.91
Angkatan Kerja (000 org)	233.81	234.60	239.29	314.09	313.11
Bekerja (000 org)	223.11	227.09	231.63	310.15	305.90
Bekerja Penuh (>= 35 jam seminggu) (000 org)	178.04	173.77	189.38	261.32	253.64
Setengah Menganggur (< 35 jam seminggu) (000 org)	45.07	53.32	42.25	48.82	52.26
Setengah Menganggur Terpaksa (000 org)	9.55	20.61	15.84	16.81	16.16
Setengah Menganggur Sukarela (000 org)	35.52	32.71	26.41	32.02	36.10
Menganggur (000 org)	10.70	7.51	7.66	3.94	7.21
Bukan Angkatan Kerja (000 org)	70.57	75.62	77.77	95.67	96.80
Sekolah (000 org)	22.60	21.80	26.91	27.50	29.19
Mengurus Rumah Tangga (000 org)	42.10	44.60	44.70	54.04	50.75
Lainnya (000 org)	5.87	9.22	6.16	14.14	16.86
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.81	75.62	75.47	76.65	76.38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.58	3.20	3.20	1.25	2.30
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95.42	96.80	96.80	98.75	97.70
Total pengangguran (pengangguran terbuka + setengah menganggur terpaksa (000 org)	20.25	28.12	23.50	20.75	23.37
Persentase total pengangguran terhadap angkatan kerja	8.66	11.99	9.82	6.61	7.46

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja di tahun 2011, ternyata tidak serta merta mengerek jumlah angkatan kerja. Hasil Sakernas

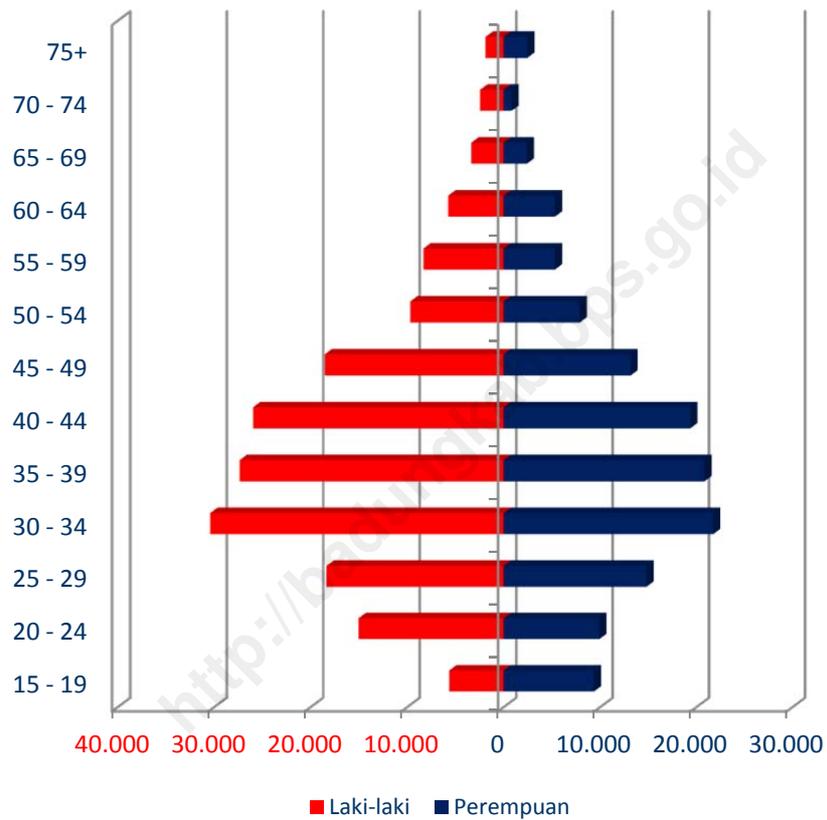
menunjukkan bahwa di tahun 2011 justru terjadi peningkatan jumlah penduduk non angkatan kerja yang disebabkan karena kenaikan jumlah penduduk yang bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya. Penurunan jumlah angkatan kerja berimbang pada penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari 76,65% di tahun 2010 menjadi 76,38% di tahun 2011. Pada tahun 2011 juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dari 310,15 ribu jiwa menjadi 305,9 ribu jiwa. Penurunan jumlah tenaga kerja ternyata juga diimbangi dengan peningkatan jumlah setengah pengangguran (pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu). Di sisi lain juga terjadi peningkatan jumlah dan persentase pengangguran. Hal ini hendaknya perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, dalam upaya pemberdayaan tenaga kerja secara optimal.

4.3. Profil Pekerja

Tenaga kerja masih terkonsentrasi di kelompok umur 25-29 tahun dengan persentase terbesar terdapat di kelompok umur 30-34 tahun. Di sisi lain masih terlihat adanya bias gender dalam pasar kerja. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai program berbasis gender, dimana baik perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama baik dalam hal memperoleh pendidikan maupun berpartisipasi aktif di dunia kerja. Namun pada kenyataannya dunia kerja masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja terjadi di setiap kelompok umur yang ditandai dengan lebih sedikitnya jumlah tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai perbandingan, secara umum di setiap 100 orang tenaga kerja perempuan

terdapat 127 orang tenaga kerja laki-laki. *Sex ratio* tenaga kerja paling tinggi terjadi pada kelompok umur 45-49 tahun yang mencapai angka 141. Artinya di setiap 100 orang tenaga kerja perempuan terdapat 141 tenaga kerja laki-laki. Sementara yang terendah terdapat di kelompok umur 15-19 tahun, yaitu sebesar 60.

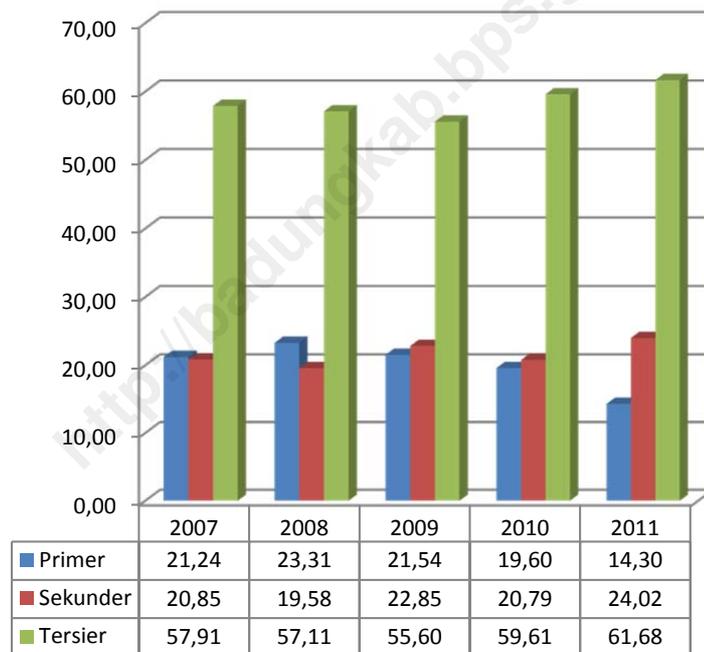
Gambar 4.
Penduduk Kabupaten Badung Yang Bekerja Menurut
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2011



Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha tidak banyak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Penduduk Kabupaten Badung masih menggantungkan diri pada sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor andalan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu mencapai 52,88%. Di tahun 2011 sektor industri mulai bergeliat dengan menyerap tenaga kerja mencapai 14,68%, melampaui sektor pertanian yang biasanya menjadi sektor penunjang utama yang menyerap 13,95%. Perkembangan ini cukup menggembirakan karena mengindikasikan berbagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran sektor industri dalam perekonomian Kabupaten Badung mulai membuahkan hasil.

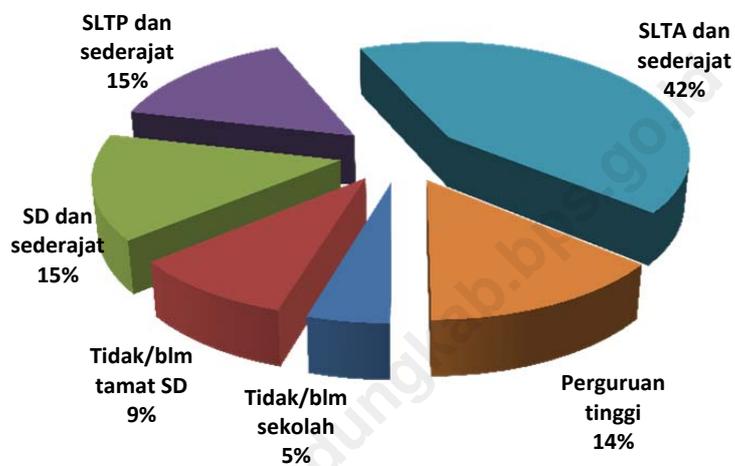
Gambar 5.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor Usaha
Kabupaten Badung, 2011



Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan para pekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka diharapkan kualitas pekerja juga semakin meningkat yang pada sehingga dapat mendongkrak produktivitas tenaga kerja tersebut. Peningkatan produktivitas pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja.

Gambar 6.
Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Badung, 2011

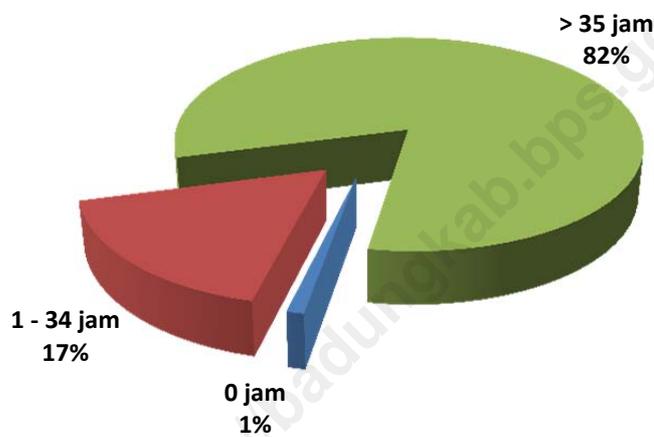


Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Hasil Sakernas 2011 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Badung sudah cukup tinggi. Sekitar 56,38% pekerja berijazah SLTA ke atas, 14,94% pekerja berijazah SLTP/sederajat dan 4,73% pekerja berijazah SD/sederajat. Namun sayangnya masih terdapat 13,94% pekerja yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal baik karena tidak pernah bersekolah sama sekali atau pun karena tidak menyelesaikan

pendidikan dasarnya. Secara umum fenomena ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Badung merupakan tenaga kerja terdidik. Berdasarkan data tersebut, tugas selanjutnya bagi Pemerintah Kabupaten Badung melalui instansi terkait adalah mengkaji kesesuaian antara kurikulum pendidikan yang ada dengan kebutuhan pasar kerja sehingga para lulusan institusi pendidikan dapat diserap di pasar kerja.

Gambar 7.
Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu
Kabupaten Badung, 2011



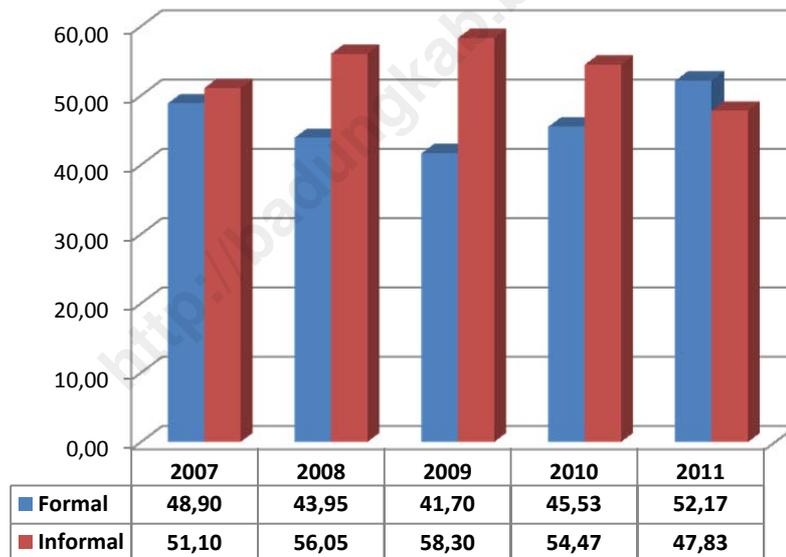
Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasarkan jumlah jam kerjanya dapat digambarkan karakteristik pekerja di suatu wilayah. Penduduk yang jam kerjanya lebih dari 35 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai pekerja penuh. Sedangkan penduduk yang jumlah jam kerjanya 1 sampai 34 jam seminggu dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pekerja paruh waktu

(*part time worker*). Penduduk yang bekerja tetapi jumlah jam kerjanya seminggu yang lalu hanya 0 jam dikategorikan sebagai sementara sedang tidak bekerja.

Dari hasil Sakernas 2011 diketahui bahwa 250.55 ribu pekerja (81,91%) merupakan pekerja penuh. Namun jumlah dan persentasenya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 257,88 ribu pekerja (83,15%). Sebaliknya jumlah setengah pengangguran justru mengalami peningkatan dari 48,82 ribu pekerja (15,74%) pada tahun 2010 menjadi 52,26 ribu pekerja (17,08%) di tahun 2011. Sedangkan sisanya sebanyak 3,09 ribu pekerja (1,01%) merupakan orang-orang yang seminggu yang lalu sedang sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok kerja dan lain sebagainya.

Gambar 8.
Jumlah Pekerja Menurut Statusnya
Kabupaten Badung, 2011



Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Meskipun terjadi penurunan jumlah pekerja di tahun 2011, namun ternyata terjadi peningkatan jumlah pekerja formal dari 141,20 ribu orang pada tahun 2010 (45,53%) menjadi 159,60 ribu orang (52,17%) pada tahun 2011. Ini berarti jumlah pekerja informal menurun dalam kurun waktu setahun terakhir yaitu dari 168,95 ribu orang (54,47%) pada tahun 2010 menjadi 146,30 ribu orang (47,83%) pada tahun 2011. Penurunan jumlah tenaga kerja informal ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja formal. Diduga pekerja informal di tahun sebelumnya yang tidak berhasil masuk ke sektor formal lebih memilih untuk tidak bekerja lagi. Ini yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pekerja secara umum.

4.4. Profil Pengangguran

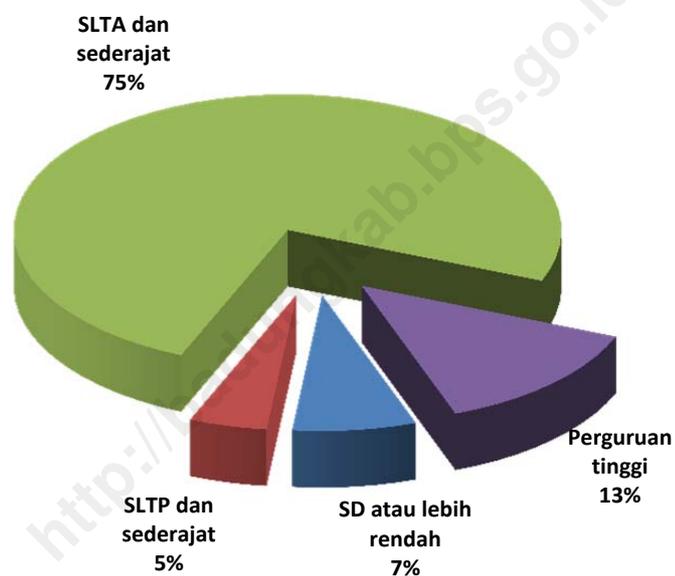
Seperti halnya penduduk yang bekerja, pengangguran juga masih didominasi oleh kaum laki-laki yang mencapai 56,76% dari total pengangguran. Berdasarkan hasil Sakernas 2011 pengangguran terkonsentrasi di kelompok umur 20-24 tahun yang mencapai sekitar 37,79% dari total pengangguran. Fenomena serupa juga ditunjukkan oleh pengangguran berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, pengangguran terkonsentrasi di kelompok umur 30 – 34 tahun.

Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, pemerintah daerah hendaknya mengupayakan program-program untuk

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tentunya secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa pengangguran di Kabupaten Badung merupakan pengangguran terdidik dimana sekitar 88,09% merupakan penduduk yang berijazah SLTA ke atas dan hanya 7,31% saja yang berijazah SD atau lebih rendah.

Gambar 9.
Pengangguran Terbuka
Menurut Tingkat Pendidikan, 2011



Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

BAB V

PEMBANGUNAN MANUSIA

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek yang lain gagal.

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik. Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup aspek fisik biologis, aspek intelektualitas dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi aspek iman dan ketaqwaan juga mendapat perhatian yang sama besar.

Pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga mempunyai ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 komponen utama yaitu:

a. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

b. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang sama.

c. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus diperbaharui.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata dilakukan untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Agar konsep pembangunan manusia dapat mudah diterjemahkan dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Selama bertahun-tahun, HDR global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia. Meskipun demikian masih ditemukan berbagai kesulitan dalam penyederhanaan konsep holistik pembangunan manusia dalam satu angka. Perlu disadari bahwa konsep pembangunan manusia lebih mendalam dan lebih kaya dari ukurannya sehingga tidak mungkin dihasilkan suatu ukuran yang komprehensif atau bahkan kumpulan indikator yang dapat menggambarkan secara komprehensif kemajuan pembangunan manusia karena banyak sekali indikator penting pembangunan manusia yang tidak terukur.

Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dari sistem sentralistik menjadi desentralistik berdampak pada semakin besarnya tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kondisi dan sumber daya (*resources*) yang ada di daerahnya secara optimal. Untuk

itu tentunya diperlukan perencanaan pembangunan yang matang dan komprehensif yang didasarkan pada data-data yang akurat dan *up to date*.

Indikator yang digunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDR)*. Indikator ini merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

5.1. Angka Harapan Hidup

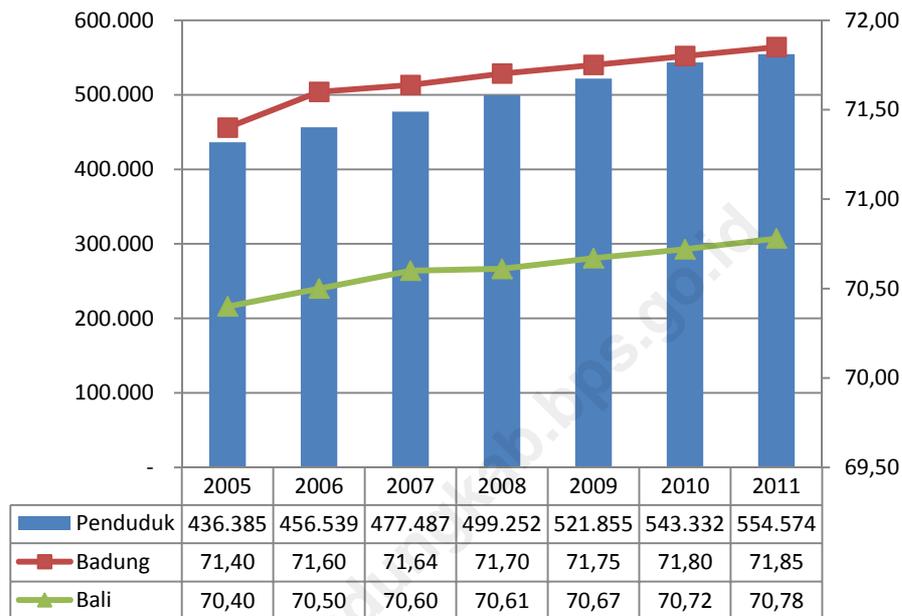
Angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting dalam berbagai analisis demografi. Angka harapan hidup adalah umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator ini biasanya menjadi satu bagian yang saling mendukung secara berbanding terbalik dengan angka kematian bayi (IMR). IMR merupakan angka peluang atau probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun.

Dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada tingkat makro. Peningkatan umur harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode pada akhirnya akan berakibat pada penurunan umur harapan hidup.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, derajat kesehatan masyarakat juga

mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah peningkatan angka harapan hidup. Pada tahun 2005 angka harapan hidup Kabupaten Badung sebesar 71,40 dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 71,85 pada tahun 2011.

Gambar 10.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Badung, 2005-2011



Sumber: BPS Prov Bali

Pada gambar di atas terlihat bahwa secara umum angka harapan hidup Kabupaten Badung berada di atas angka harapan hidup Provinsi Bali yang hanya sebesar 70,78 pada tahun 2011. Namun demikian jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Badung menduduki peringkat ke-5 setelah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana.

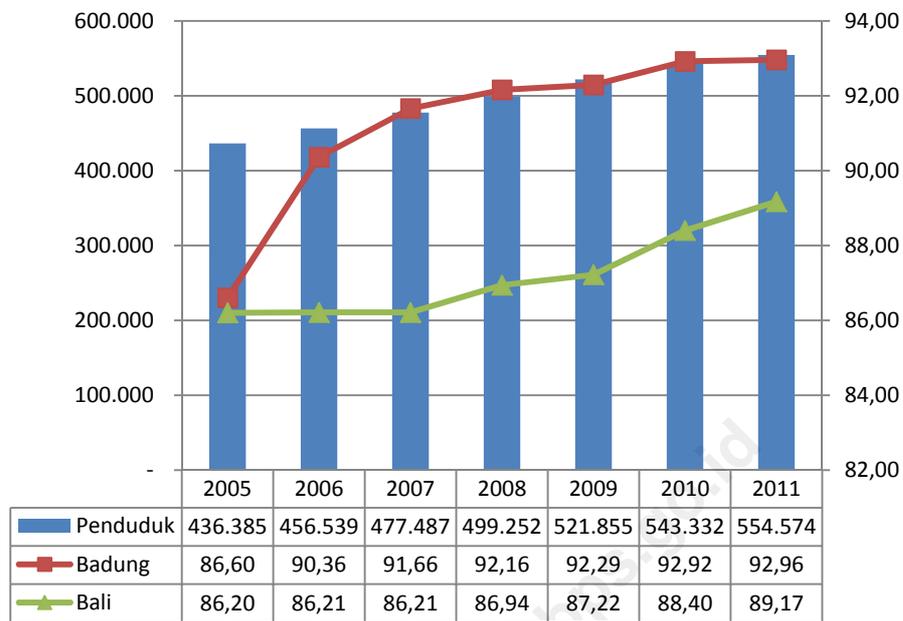
5.2. Angka Melek Huruf

Upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan peningkatan standar pendidikan. Makin tinggi pendidikan masyarakat, makin luas pengetahuan dan wawasan penduduk sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru terutama ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Salah satu indikator makro dan sangat mendasar dari sektor pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini diterjemahkan dalam bentuk indikator tunggal yang disebut angka melek huruf. Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Kemampuan membaca saja atau menulis saja belum memenuhi syarat untuk dikatakan melek huruf. Kemampuan membaca dan menulis yang digunakan dalam penghitungan IPM ini adalah untuk kategori penduduk usia 15 tahun ke atas.

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Badung secara umum berdampak positif terhadap kualitas manusianya. Salah satunya diindikasikan dengan peningkatan angka melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun ke atas selama beberapa tahun terakhir yaitu dari 86,60 persen pada tahun 2005 kemudian meningkat menjadi 92,16 persen pada tahun 2008 dan terus meningkat hingga mencapai 92,96 persen pada tahun 2011. Artinya, pada tahun 2011 hanya tinggal 7,04 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf.

Gambar 11.
Angka Melek Huruf
Kabupaten Badung, 2005-2011



Sumber: BPS Prov Bali

Dari gambar di atas terlihat bahwa selama tujuh tahun terakhir angka melek huruf Kabupaten Badung berada di atas Provinsi Bali. Di sisi lain juga tergambar kecepatan peningkatan angka melek huruf Kabupaten Badung jauh melebihi kecepatan Provinsi Bali.

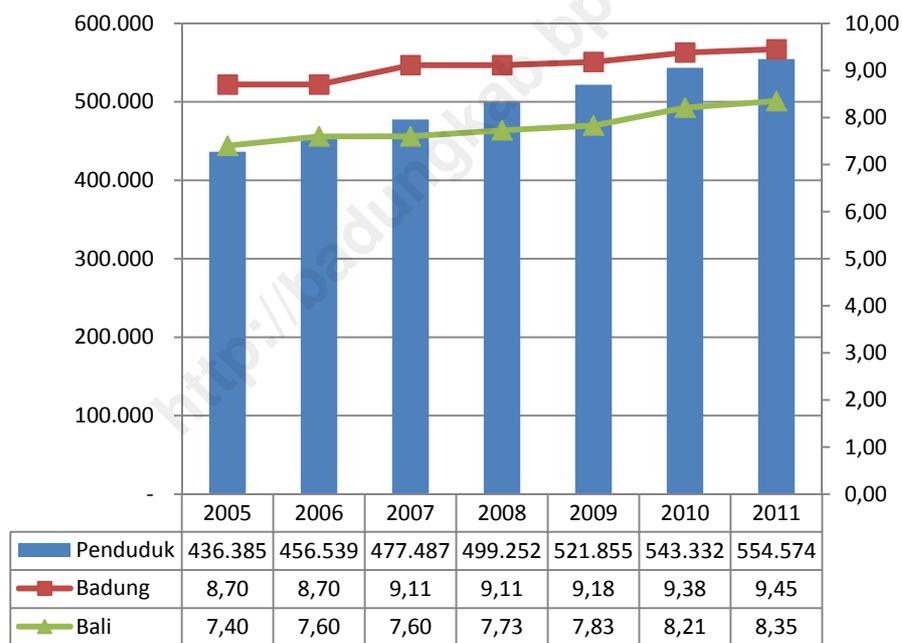
5.3.Rata-Rata Lama Sekolah

Sebagai bagian dari indikator pendidikan, lama sekolah bisa memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang

telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Semakin lama seseorang bersekolah diasumsikan semakin baik kualitas orang tersebut.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan telah membawa hasil yang positif. Sejak tahun 2007, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Badung sudah berada di atas 9 tahun. Ini artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Badung telah mengenyam pendidikan formal selama 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi sehingga diharapkan melalui program pemerintah daerah Wajib Belajar 12 tahun, kualitas SDM Kabupaten Badung dapat lebih ditingkatkan lagi.

Gambar 12.
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Badung, 2005-2011



Sumber: BPS Prov Bali

Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Badung sudah mencapai 9,45 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 9,38 tahun. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali pencapaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Badung hanya berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar yang sudah mencapai 10,70 tahun.

5.4. Daya Beli Masyarakat

Tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat baik berupa uang, barang, maupun jasa dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Dalam prakteknya pengumpulan data pendapatan sangat sulit dilakukan, oleh karena itu sebagai pendekatan digunakan data pengeluaran. Data pengeluaran berupa konsumsi makanan dan non makanan mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk tersebut.

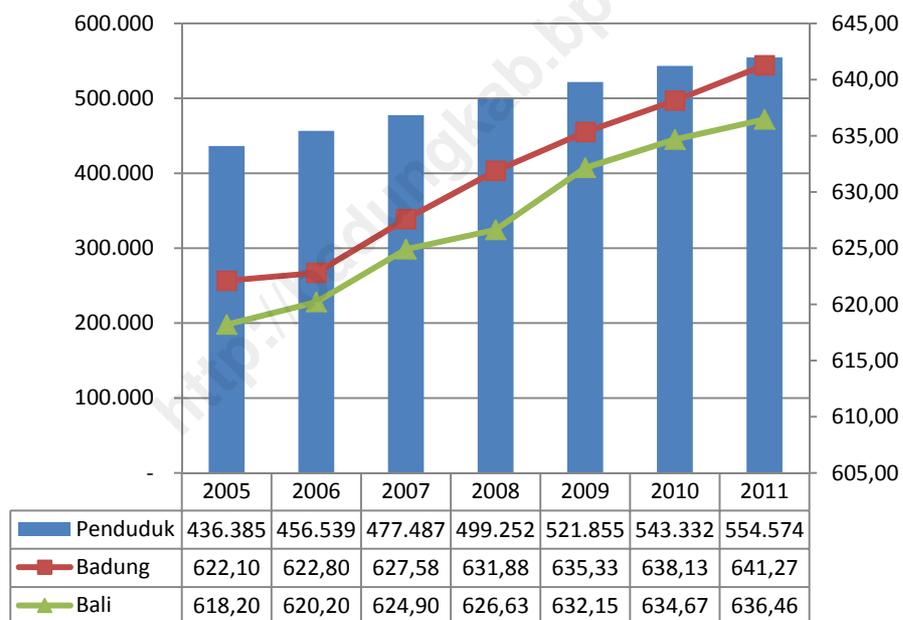
Tingkat pengeluaran masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor di antaranya pendidikan, lapangan kerja, status sosial, ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Dalam level makro, penghitungan kesejahteraan ekonomi penduduk yang merupakan agregat dari tingkat pengeluaran individu, sering digunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengeluaran per kapita yang dibicarakan di atas hanya memperlihatkan nilai nominal rupiah, artinya besaran yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Dalam realitanya nilai rupiah sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi, sehingga jumlah uang pada tahun tertentu nilainya tidak sama dengan nilai tahun sebelum atau sesudahnya. Oleh karena itu, dalam

penghitungan IPM ini nilai pengeluaran telah dikoreksi dengan inflasi dan paritas daya beli. Dengan koreksi tersebut kesejahteraan yang diukur dengan pendapatan sudah benar-benar riil dan *comparable* antar tempat dan waktu.

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan ekonomi, pendapatan masyarakat yang di-proxy-kan dari pengeluaran perkapita juga terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2005–2011 pengeluaran riil perkapita penduduk yang telah disesuaikan menunjukkan kecenderungan peningkatan yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk walaupun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Gambar 13.
Daya Beli Masyarakat
Kabupaten Badung, 2005-2011



Sumber: BPS Prov Bali

Gambar di atas mencerminkan perkembangan daya beli masyarakat Kabupaten Badung dibandingkan dengan Provinsi Bali. Dari gambar terlihat bahwa selama kurun waktu 2005-2011 daya beli masyarakat baik Provinsi Bali dan Kabupaten Badung cenderung mengalami peningkatan meski secara nominal kenaikannya tidak terlalu besar. Secara umum daya beli masyarakat Kabupaten Badung berada di atas daya beli Provinsi Bali. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, daya beli Kabupaten Badung hanya menempati posisi ke-5 setelah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.

Daya beli pada dasarnya merupakan kemampuan riil masyarakat dalam konsumsi kebutuhan sehari-harinya. Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa daya beli dihitung berdasarkan konsumsi terhadap 27 komoditi utama baik makanan maupun non makanan yang paling besar sumbangannya terhadap total pengeluaran masyarakat. Konsumsi ini erat kaitannya dengan gaya hidup, ketersediaan dan harga barang yang dikonsumsi di wilayah yang bersangkutan. Di daerah perkotaan, barang-barang yang tersedia di pasaran umumnya bukan merupakan produk lokal melainkan impor dari daerah/negara lain. Hal ini akan menimbulkan margin perdagangan yang lebih tinggi. Akibatnya harga barang akan lebih tinggi. Termasuk harga sewa rumah yang pastinya lebih mahal jika dibandingkan dengan perdesaan. Sebaliknya tingkat pengeluaran masyarakat di daerah perdesaan secara nominal pasti lebih rendah karena harga barang yang dikonsumsi relatif lebih rendah kualitasnya, apalagi jika barang tersebut merupakan produk lokal sehingga pengaruh margin perdagangan relatif kecil. Implikasinya dengan nilai nominal uang yang sama, penduduk di daerah perkotaan akan diperoleh barang dengan

jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Ini berarti daya beli riil masyarakat perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Analogi yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan daya beli antar kabupaten/kota.

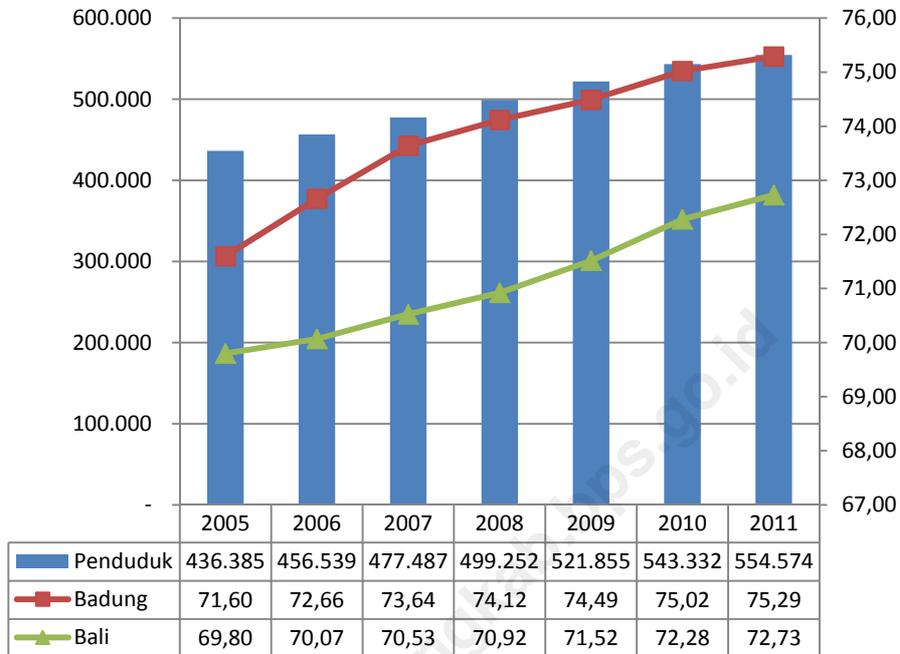
5.5. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai subjek dan objek pembangunan manusia merupakan central point dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan.

IPM Kabupaten Badung maupun Provinsi Bali mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini berarti berbagai kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil oleh pemerintah daerah berdampak positif terhadap peningkatan kualitas manusia. Meskipun demikian kecepatan pembangunan manusia masih relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Selama periode 2004-2006 peningkatan IPM Kabupaten Badung mengalami percepatan, kemudian melambat pada periode 2006-2009, kemudian mengalami percepatan kembali pada periode 2009-2010 dan melambat kembali pada periode 2010-2011. Meskipun demikian pencapaian IPM Kabupaten Badung sudah berada di atas IPM Provinsi Bali. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Badung untuk tetap fokus dalam

mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pembangunan manusia bagi masyarakatnya.

Gambar 14.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Badung, 2005-2011



Sumber: BPS Prov Bali

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu indikator, IPM dihitung salah satunya adalah untuk melihat keterbandingan antar wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi relatif pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pencapaian IPM Kabupaten Badung berhasil menduduki peringkat ke-2 di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota, 2005 – 2011

Kabupaten/ Kota	IPM							Ranking 2011	Reduksi Shortfall2010- 2011	Peringkat Reduksi Shortfall 2010 - 2011
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
Jembrana	70.40	70.66	71.40	72.02	72.45	72.69	73,06	5	1,34	7
Tabanan	72.30	72.38	73.11	73.73	74.26	74.57	75,07	3	1,99	2
Badung	71.60	72.66	73.64	74.12	74.49	75.02	75,29	2	1,07	8
Gianyar	70.80	71.10	71.66	72.00	72.43	72.73	73,32	4	2,15	1
Klungkung	68.70	68.90	69.01	69.66	70.19	70.54	70,99	8	1,54	5
Bangli	68.70	68.94	69.46	69.72	70.21	70.71	71,21	6	1,70	3
Karangasem	63.30	64.29	65.11	65.46	66.06	66.42	66,78	9	1,07	8
Buleleng	68.10	68.41	69.15	69.67	70.26	70.69	71,14	7	1,53	6
Denpasar	75.20	75.65	76.59	77.18	77.56	77.94	78,30	1	1,66	4
BALI	69.80	70.07	70.53	70.92	71.52	72.28	72.73		1,61	

Sumber: BPS Prov Bali

Selama periode 2005-2011, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan pencapaian IPM. Yang membedakannya hanya kecepatan laju peningkatan IPM. Perbedaan kecepatan ini tentunya dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan peningkatan komponen-komponen di masing-masing kabupaten/kota. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik di masing-masing wilayah kabupaten/kota seperti kondisi demografi, pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta ketersediaan infrastruktur penunjangnya. Kecepatan perubahan IPM inilah yang ditunjukkan oleh ukuran reduksi shortfall. Pada periode 2010-2011 ini Pemerintah Kabupaten Badung memiliki nilai reduksi shortfall yang paling rendah (sejajar dengan Kabupaten Karangasem) jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu tersebut, kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Badung relatif masih rendah jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya di Propinsi Bali. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal perencanaan pembangunan untuk dapat lebih menekankan pada program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih efektif dan efisien.

Perbaikan pembangunan manusia tidak hanya ditunjukkan oleh besaran nilai IPM saja. Pemerataan pembangunan manusia antar daerah dapat tergambar dari nilai “polaritas” rentang nilai IPM tertinggi dengan nilai IPM terendah. Rentang nilai IPM pada tahun 2004 sebesar 11,90 sementara pada tahun 2011 menurun menjadi 11,53. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bali meskipun kesenjangan tersebut semakin lama semakin mengecil.

BAB VI

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan masalah pokok dalam pembangunan, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa ahli ekonomi dunia seperti (Kuznet), (Adelman) dan (Morris) serta (Chennery) dan (Syrquin) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya kesenjangan terutama pada tahap awal proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Products* (GNP) yang tinggi, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi padat modal yang notabene dikuasai oleh kaum elit kaya raya yang minoritas. Sehingga hasilnya pun kurang dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat miskin. Hal ini akan memperparah ketimpangan pendapatan dan meningkatkan jumlah kemiskinan absolut. Sebaliknya jika yang digerakkan adalah sektor-sektor ekonomi padat karya yang notabene digeluti oleh mayoritas rakyat miskin maka target pertumbuhan ekonomi secara agregat akan sulit dicapai.

Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) dalam mensejahterakan penduduk, tetapi belum merupakan syarat cukup (*sufficient*). Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiring dengan menurunnya pengangguran, kemiskinan dan

semakin meratanya distribusi pendapatan diantara penduduk. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi baru dikatakan berhasil jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan yang diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Sebaliknya pembangunan dikatakan gagal jika pendapatan perkapita menurun atau pendapatan perkapita mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan atau sebaliknya, pendapatan perkapita tidak mengalami perubahan namun distribusi pendapatan tidak merata di kalangan penduduknya.

Ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kaitan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu:

1. Semua anggota masyarakat mempunyai *income* tinggi (tidak ada yang miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya juga tinggi.
2. Semua anggota masyarakat mempunyai *income* tinggi (tidak ada yang miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Ini merupakan kondisi terbaik.
3. Semua anggota masyarakat mempunyai *income* rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
4. Semua anggota masyarakat mempunyai *income* rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.
5. Tingkat *income* masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.
6. Tingkat *income* masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

6.1. Ketimpangan Pendapatan

Pada bab III sudah dijelaskan berbagai ukuran yang biasanya digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, diantaranya distribusi ukuran, kriteria bank dunia dan *gini ratio*. Distribusi ukuran menggambarkan besarnya persentase pendapatan regional yang diterima oleh masing-masing desil penduduk yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat pendapatannya.

Tabel 3. Distribusi Ukuran Untuk Masing-Masing Desil Pendapatan Kabupaten Badung, 2006-2011

Desil	Persentase Pendapatan					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	3.93	5.29	3.68	4.99	4.03	3.25
2	5.17	6.78	5.64	6.01	5.19	4.30
3	6.17	7.79	6.50	7.08	6.08	5.47
4	7.20	8.26	7.51	7.41	6.96	6.19
5	8.34	9.49	8.36	8.75	7.79	7.34
6	9.02	9.99	9.12	9.26	9.10	9.11
7	10.36	11.05	10.39	10.33	10.12	10.13
8	12.07	11.69	11.71	12.10	12.06	11.92
9	14.16	13.01	14.56	13.96	14.77	15.08
10	23.57	16.66	22.53	20.12	23.90	27.23

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada tahun 2011, 10% penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya menerima sekitar 3,25% dari total pendapatan, sedangkan 10% penduduk dengan tingkat pendapatan tertinggi menerima 27,23% dari total pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan antara penduduk. Semakin rendah persentase pendapatan yang diterima oleh 10% penduduk termiskin dan semakin

tinggi pendapatan yang diterima oleh 10% penduduk terkaya maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.

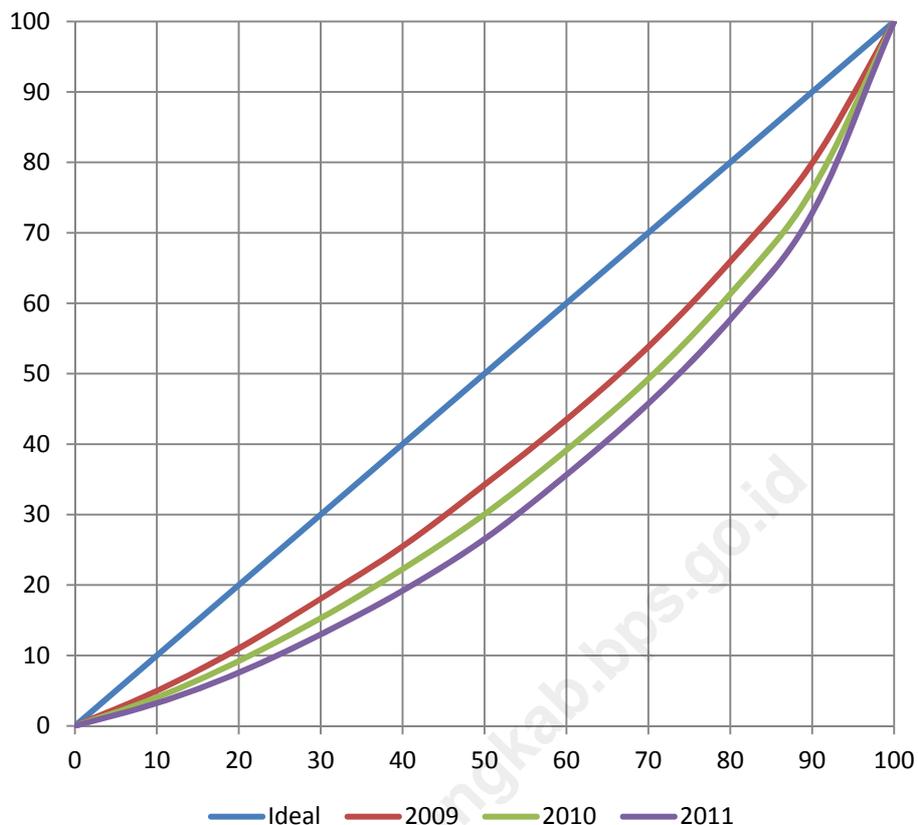
Tabel 4. Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Badung, 2006-2011

Kriteria penduduk	2006	2007	2008	2009	2010	2011
40% penduduk berpendapatan terendah	22.47	28.12	23.32	25.49	22.26	19.20
40% penduduk berpendapatan menengah	39.80	42.21	39.58	40.43	39.07	38.50
20% penduduk berpendapatan tertinggi	37.74	29.67	37.10	34.08	38.68	42.30

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Tabel distribusi ukuran menjadi dasar dalam penghitungan kriteria Bank Dunia. Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan rendah. Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung tergolong rendah karena 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari total pendapatan. Meski demikian tingkat ketimpangan yang terjadi di tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah merupakan yang paling kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 15.
Kurva Lorenz Kabupaten Badung, 2009-2011

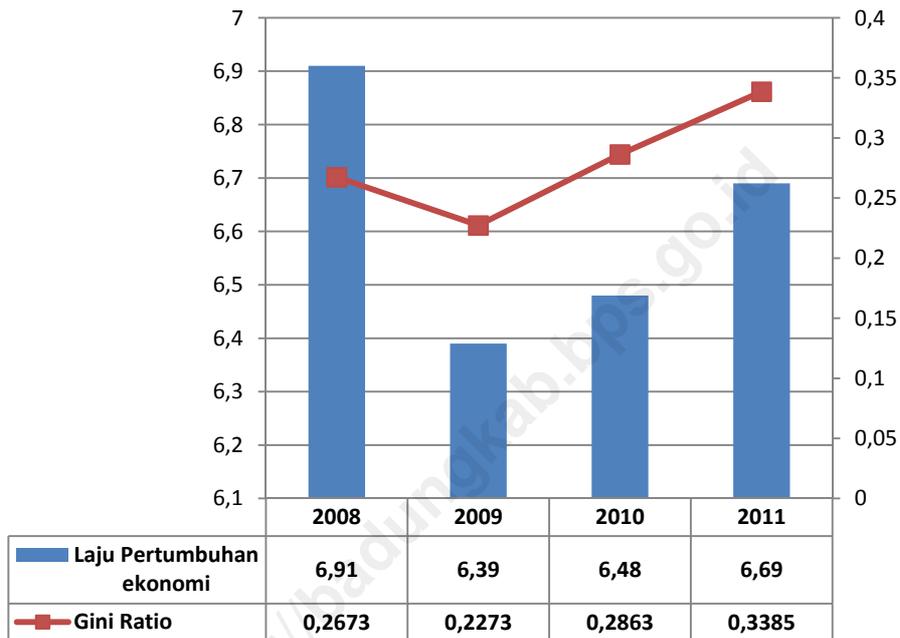


Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Ketimpangan pendapatan juga dapat disajikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Kurva ini menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut. Tingkat ketimpangan dilihat dengan membandingkan jarak antara kurva dengan diagonal utama. Semakin besar jarak antara Kurva Lorenz terhadap diagonal utama, maka ketimpangan semakin

tinggi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya karena jarak antara Kurva Lorenz dengan diagonal utama lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 16.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan *Gini Ratio*
Kabupaten Badung, 2008-2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Ukuran lainnya yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio*. Semakin besar *Gini Ratio* maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan. Hasil Susenas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2011 merupakan yang tertinggi selama enam

tahun terakhir. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, karena tingginya tingkat ketimpangan mengindikasikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara berkualitas.

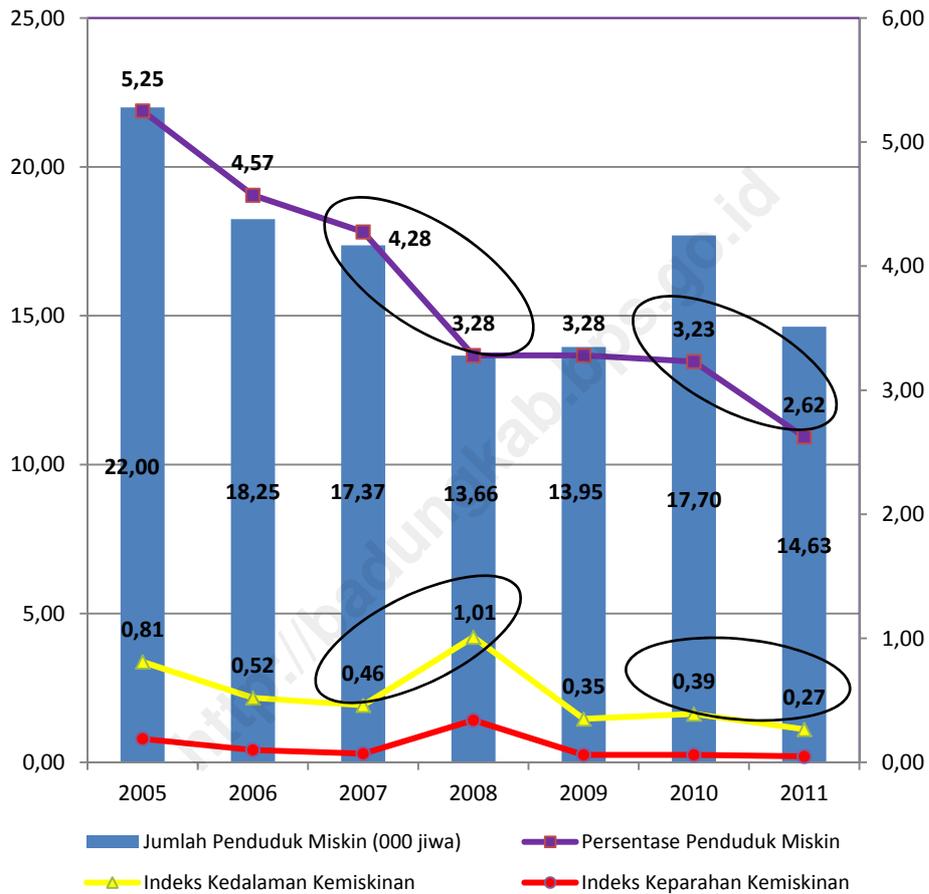
Data-data empiris selama empat tahun terakhir juga membuktikan terjadinya hipotesis Kuznet di Kabupaten Badung yang menyatakan bahwa tingginya laju pertumbuhan ekonomi senantiasa diikuti oleh tingginya tingkat ketimpangan pendapatan. Tingkat ketimpangan berada di titik terendah justru ketika laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Berdasarkan data-data tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemerataan pendapatan di kalangan penduduknya.

6.2. Kemiskinan

Secara makro, kondisi kemiskinan di Kabupaten Badung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama kurun waktu 2005-2011, persentase penduduk miskin cenderung terus menurun dari 5,25 di tahun 2005 menjadi 2,62 di tahun 2011. Meskipun demikian ada hal-hal yang juga perlu mendapat perhatian serius. Pada periode 2007-2008, ketika penduduk miskin mengalami penurunan cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentase, di sisi lain indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meski jumlah

penduduk miskin menurun, namun rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh jaraknya dengan garis kemiskinan atau dengan kata lain penduduk miskin menjadi semakin miskin. Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang meningkat mengindikasikan bahwa kesenjangan diantara penduduk miskin juga semakin besar.

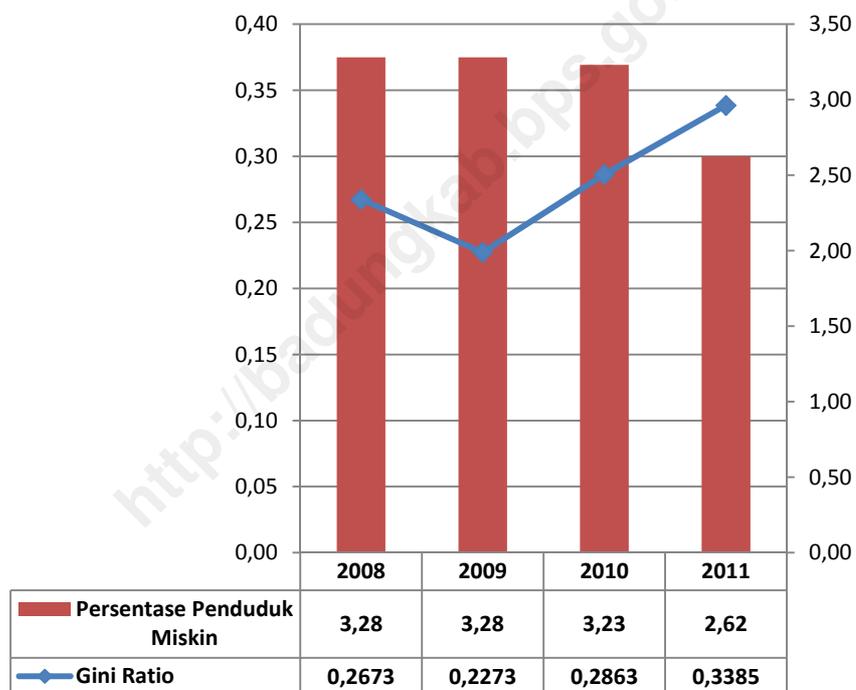
Gambar 17.
Perkembangan Kemiskinan Kab. Badung 2005 - 2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sementara itu pada periode 2010-2011, penurunan persentase penduduk miskin dari 3,23 di tahun 2010 menjadi 2,62 di tahun 2011 ternyata juga diikuti oleh penurunan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,39 pada tahun 2010 menjadi 0,27 pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan ternyata berdampak positif, tidak saja menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin melainkan juga memperbaiki tingkat kesejahteraannya sehingga makin mendekati garis kemiskinan.

Gambar 18.
Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
Kabupaten Badung 2008-2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin serta perbaikan tingkat kesejahteraan di kalangan penduduk miskin ternyata tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Data empiris menunjukkan selama tiga tahun terakhir kesenjangan pendapatan justru meningkat. Hal perlu juga perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah karena di tengah gencarnya pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, ketimpangan pendapatan justru terjadi di kalangan penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih beresiko rentan untuk jatuh ke jurang kemiskinan (20% penduduk berpenghasilan terendah). Jika hal ini dibiarkan terus menerus justru berpotensi untuk memperbesar tingkat kemiskinan yang tentunya akan semakin memberatkan kerja Pemerintah Daerah.

BAB VII

POLA KONSUMSI

7.1. Konsumsi Perkapita

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk. Salah satunya yang sering digunakan adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan besaran rata-rata pendapatan penduduk suatu wilayah/region. Pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Dalam hal ini pendapatan perkapita sering direfleksikan sebagai PDRB perkapita.

Selain PDRB perkapita, tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari rata-rata konsumsi perkapita. Jika peningkatan konsumsi perkapita lebih tinggi daripada peningkatan harga (inflasi) dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk juga meningkat. Dengan menggunakan konsumsi perkapita dapat pula dihitung tingkat konsumsi tertentu untuk mengklasifikasikan masyarakat menjadi miskin atau tidak miskin. Tingkat konsumsi perkapita tersebut dinamakan garis kemiskinan.

Konsumsi perkapita diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh Indonesia. Dalam survei tersebut dicatat semua pengeluaran penduduk yang menjadi sampel sebagai pendekatan (*proxy*) dari pendapatannya. Hal ini didasarkan asumsi dan fakta bahwa data pengeluaran lebih teliti dan lebih representatif dalam menggambarkan tingkat pendapatan.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan pendekatan *consumption approach* artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi (seminggu yang lalu). Sedangkan pengeluaran untuk non makanan dihitung menggunakan *delivery approach* artinya yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan yang lalu).

Rata-rata konsumsi perkapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 tercatat rata-rata konsumsi penduduk Kabupaten Badung sebesar Rp. 1.016,7 ribu/kapita/bulan atau mengalami peningkatan sekitar 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 810,4 ribu/kapita/bulan. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh penduduk. Sebagai pembanding tingkat inflasi di Kabupaten Badung

pada tahun 2011 sebesar 2,33%. Sementara PDRB perkapita sebesar Rp. 29,58 juta/kapita/tahun. Berdasarkan data-data tersebut secara tersirat dapat disimpulkan bahwa secara terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Badung.

Di sisi lain masih terdapat perbedaan tingkat pendapatan antara wilayah perdesaan dengan perkotaan. Tingkat konsumsi di daerah perkotaan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.050,5 ribu/kapita/bulan atau lebih tinggi 21,05% dibandingkan dengan tingkat konsumsi di daerah perdesaan yang hanya sebesar Rp. 867,9 ribu/kapita/bulan. Perbedaan ini ditengarai disebabkan karena perbedaan harga barang antar perkotaan dan perbedaan yang cukup signifikan serta perbedaan selera dalam konsumsi barang dan jasa antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan.

Tabel 5. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab.Badung (000 Rp) Menurut Klasifikasi Daerah, Inflasi, dan PDRB Perkapita, Tahun 2008 – 2010

Tahun	Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)			Inflasi	PDRB perkapita (juta rupiah)
	K	D	K+D		
2008	721.3	480.4	654.9	9.36	20.98
2009	758.7	570.1	706.7	3.00	24.67
2010	860.9	585.8	810.4	5.84	27.47
2011	1,050.5	867.9	1,016.7	2.33	29.58

Sumber: BPS Kab. Badung

7.2.Pola Konsumsi

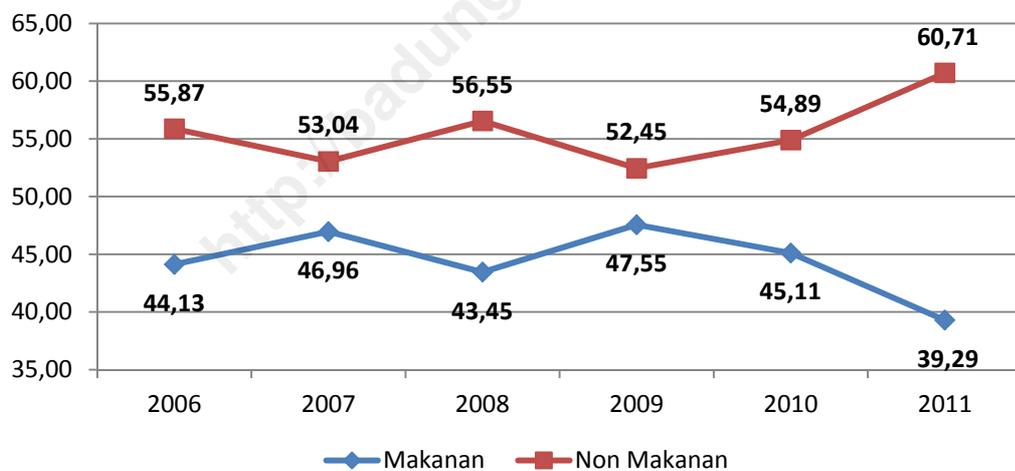
Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pola konsumsi masyarakat menggambarkan alokasi dan komposisi atau bentuk konsumsi yang berlaku secara umum pada anggota masyarakat. Alokasi konsumsi sangat tergantung pada definisi dan persepsi masyarakat mengenai kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non- makanan.

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Konsumen akan memilih barang kebutuhan pokok untuk dikonsumsi, dengan mempertimbangkan nilai guna dari barang tersebut. Keterbatasan anggaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat menyebabkan masyarakat harus menunda untuk mengkonsumsi barang-barang yang mempunyai nilai guna tinggi.

Hal-hal di atas menjadi salah satu dasar untuk menggunakan indikator pola konsumsi sebagai gambaran dari tingkat kesejahteraan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. (Ernest Engel) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengeluaran rumahtangga dapat mengindikasikan semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian juga halnya, semakin sejahtera suatu masyarakat cenderung memiliki pengeluaran non makanan lebih besar dari konsumsi makanan.

Gambar 19.
Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Menurut Jenis Pengeluaran, 2006-2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pergeseran konsumsi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Data Susenas beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan di Kabupaten Badung lebih rendah daripada konsumsi non makanan. Bahkan proporsi konsumsi makanan menunjukkan kecenderungan terus menurun. Hal ini terjadi seiring peningkatan kesejahteraan penduduk yang mulai mengalokasikan pendapatan tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, yaitu:

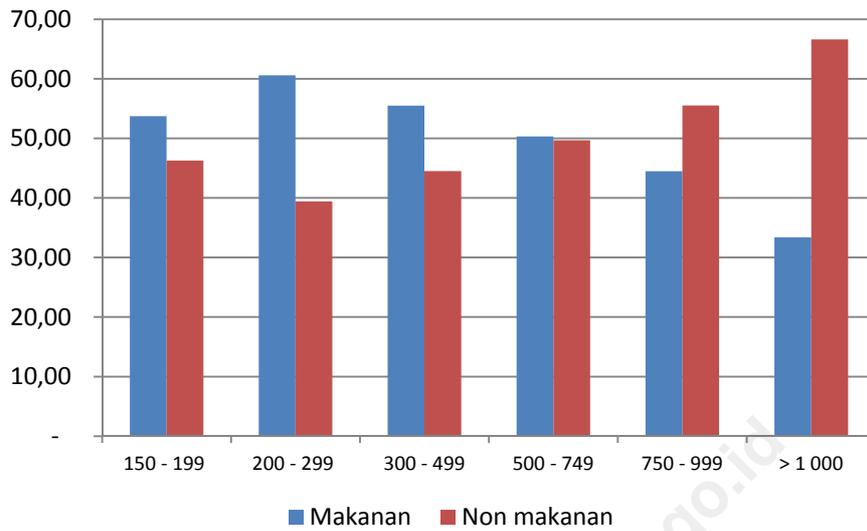
- Tingkat pendapatan masyarakat
Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula.
- Selera
Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya.
- Harga barang

Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan. Kaitan konsumsi dengan harga barang dapat dibedakan apakah barang tersebut bersifat substitusi (barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan fungsi barang lainnya) atau komplementer (barang komplementer adalah barang bersifat saling melengkapi dengan barang lainnya).

- Tingkat pendidikan masyarakat
Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya.
- Besar kecilnya jumlah keluarga
- Lingkungan
Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di kutub utara dan kutub selatan.

Perbedaan pola konsumsi semakin terlihat jelas pada gambar berikut yang menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan dan non makanan pada masing-masing kelompok pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pengeluaran maka proporsi konsumsi makanan cenderung terus menurun dan sebaliknya proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan justru semakin meningkat.

Gambar 20.
Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Menurut Kelas Pengeluaran (000 rupiah), 2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tahun ke tahun, data empirik menggambarkan bahwa persentase konsumsi makanan di daerah perkotaan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan perdesaan. Ini ditengarai karena perbedaan tingkat harga dan preferensi/selera penduduk dalam mengkonsumsi barang/jasa. Bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, pengeluaran konsumsi lebih banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk pangan, pada saat yang sama sangat sedikit pengeluaran konsumsi untuk jenis bukan pangan. Secara umum kesenjangan antara pengeluaran makanan dan non makanan juga lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan.

**Tabel 6. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006–2011**

Tahun/ Klasifikasi Daerah		Pengeluaran makanan perkapita		Pengeluaran non makanan perkapita		Pengeluaran perkapita (000 Rp)
		(000 Rp)	%	(000 Rp)	%	
2006	K	209.7	43.74	269.8	56.26	479.5
	D	150.1	45.14	182.4	54.86	332.4
	K+D	188.4	44.13	238.5	55.87	426.9
2007	K	220.2	46.76	250.6	53.24	470.8
	D	187.9	47.37	208.8	52.63	396.7
	K+D	208.7	46.96	235.7	53.04	444.4
2008	K	310.8	43.09	410.5	56.91	721.3
	D	215.7	44.90	264.7	55.10	480.4
	K+D	284.6	43.45	370.3	56.55	654.9
2009	K	356.9	47.03	401.9	52.97	758.7
	D	281.4	49.36	288.7	50.64	570.1
	K+D	336.1	47.55	370.7	52.45	706.7
2010	K	388.9	45.17	472.0	54.83	860.9
	D	261.9	44.70	323.9	55.30	585.8
	K+D	365.6	45.11	444.9	54.89	810.4
2011	K	408.1	38.85	642.4	61.15	1,050.5
	D	361.4	41.64	506.5	58.36	867.9
	K+D	399.5	39.29	617.3	60.71	1,016.7

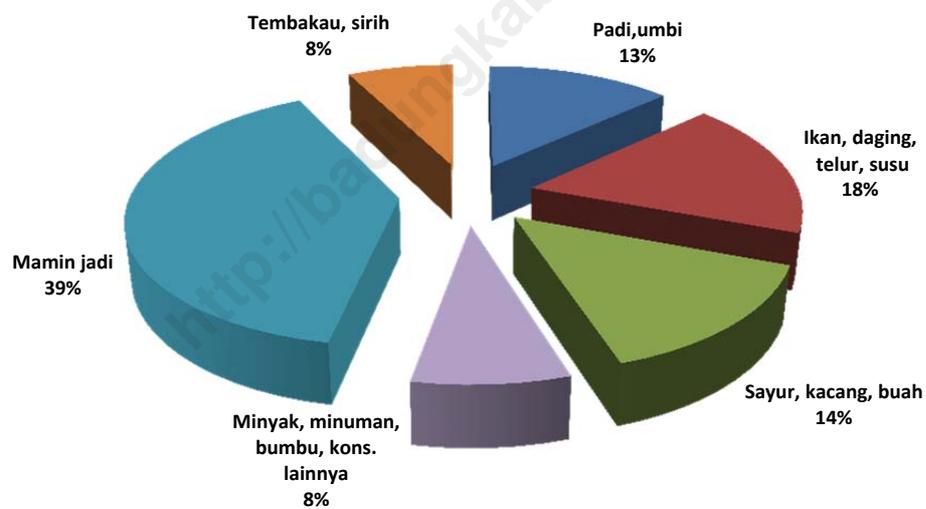
Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

7.2.1. Pola Konsumsi Makanan

Pola konsumsi makanan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat preferensi penduduk terhadap komoditi bahan makanan tertentu. Hal ini secara tidak langsung juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi penduduk secara umum. Semakin tinggi tingkat konsumsi terhadap makanan dan minuman jadi maka dapat dikatakan bahwa

penduduk juga semakin sejahtera. Dikatakan demikian karena harga makanan dan minuman jadi umumnya relatif mahal dan hanya penduduk dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik saja yang lebih memilih untuk mengkonsumsi jenis komoditi ini. Tingkat konsumsi makanan dan minuman jadi juga sangat erat kaitannya dengan gaya hidup penduduk. Bahkan muncul semacam paradigma bahwa konsumsi komoditi ini menunjukkan tingkat modernitas hidup seseorang. Dalam kajian ini komoditi makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dibagi menjadi 14 jenis, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih.

Gambar 21.
Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Untuk Kelompok Makanan, 2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Seperti tahun sebelumnya, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai Rp. 157,8 ribu perkapita per bulan atau sekitar 39% dari total pengeluaran makanan masih merupakan *share* terbesar konsumsi makanan penduduk Kabupaten Badung. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Badung sudah cukup tinggi. Apalagi diikuti dengan konsumsi bahan makanan sumber protein hewani seperti ikan, daging, telur dan susu yang juga cukup tinggi yaitu mencapai Rp 70 ribu perkapita per bulan atau sekitar 18%. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penduduk sudah memiliki kesadaran akan arti pentingnya protein bagi kesehatan tubuh. Sementara itu pengeluaran untuk konsumsi sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan mencapai Rp. 57,4 ribu perkapita per bulan atau sekitar 14%, sedangkan pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih masih cukup tinggi yaitu mencapai Rp 30 ribu perkapita per bulan atau sekitar 8% dari total pengeluaran makanan.

Secara umum pola konsumsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana konsumsi makanan dan minuman jadi, beras serta tembakau dan sirih masih menjadi primadona konsumsi penduduk untuk kelompok makanan. Namun jika dikaji lebih jauh terdapat sedikit perbedaan preferensi penduduk di kedua tipe wilayah tersebut dalam mengkonsumsi masing-masing jenis komoditi makanan.

Proporsi pengeluaran yang digunakan oleh penduduk di daerah perkotaan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi jadi mencapai 40,24% lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perdesaan yang hanya sebesar 35,89%. Demikian pula hal dengan

konsumsi sumber protein seperti ikan, daging, telur dan susu yang mencapai 18,07% di daerah perkotaan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi di daerah perdesaan yang hanya sebesar 14,77%.

Tabel 7. Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2011

Jenis Komoditi	Nominal (000 Rp)			Persentase		
	K	D	K+D	K	D	K+D
Padi-padian	49.3	58.3	51.0	12.08	16.14	12.76
Umbi-umbian	1.7	2.2	1.8	0.41	0.61	0.44
Ikan/udang/cumi/kerang	18.4	16.4	18.1	4.52	4.55	4.52
Daging	23.1	18.5	22.2	5.65	5.12	5.56
Telur dan susu	32.2	18.4	29.7	7.90	5.10	7.43
Sayuran	26.7	27.9	26.9	6.54	7.73	6.74
Kacang-kacangan	8.6	7.6	8.4	2.10	2.11	2.10
Buah-buahan	22.9	18.4	22.1	5.62	5.09	5.53
Minyak dan lemak	9.0	9.6	9.1	2.22	2.65	2.29
Bahan minuman	9.7	12.7	10.3	2.38	3.52	2.57
Bumbu-bumbuan	6.1	5.4	5.9	1.48	1.50	1.49
Konsumsi lainnya	6.4	4.9	6.2	1.58	1.36	1.54
Makanan dan minuman jadi	164.2	129.7	157.8	40.24	35.89	39.51
Tembakau dan sirih	29.8	31.2	30.0	7.29	8.64	7.52
Total	408.1	361.4	399.5	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Hal sebaliknya terjadi pada konsumsi padi-padian dan umbian dimana yang mencapai 12,49% di daerah perkotaan, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perdesaan yang mencapai 16,75%. Demikian pula halnya dengan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi tembakau dan sirih dimana penduduk perdesaan menggunakan 8,64% pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih termasuk di dalamnya rokok, lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang hanya menggunakan 7,29% pengeluaran untuk konsumsi komoditi ini. Hal serupa juga terjadi untuk komoditi sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman serta konsumsi bahan makanan lainnya.

Tabel 8. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006 -2011

Jenis Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Padi-padian	22.14	19.62	15.19	14.20	13.34	12.76
Umbi-umbian	0.72	0.44	0.44	0.49	0.25	0.44
Ikan	6.25	5.24	5.48	5.92	5.43	4.52
Daging	7.48	7.33	6.07	6.69	5.48	5.56
Telur dan susu	7.45	7.13	6.93	7.22	7.52	7.43
Sayuran	6.58	6.34	6.46	6.29	6.44	6.74
Kacang-kacangan	4.02	3.00	2.39	2.83	2.38	2.10
Buah-buahan	2.93	4.56	3.32	3.39	2.75	5.53
Minyak, lemak	3.48	3.41	3.00	2.98	2.27	2.29
Bahan Minuman	4.75	3.82	2.99	2.88	2.35	2.57
Bumbu-bumbuan	1.81	1.65	1.47	1.60	1.04	1.49
Konsumsi lainnya	3.63	2.61	2.35	2.52	2.03	1.54
Makanan dan minuman jadi	18.80	26.17	35.80	34.59	40.22	39.51
Tembakau, sirih	9.95	8.69	8.11	8.39	8.48	7.52

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

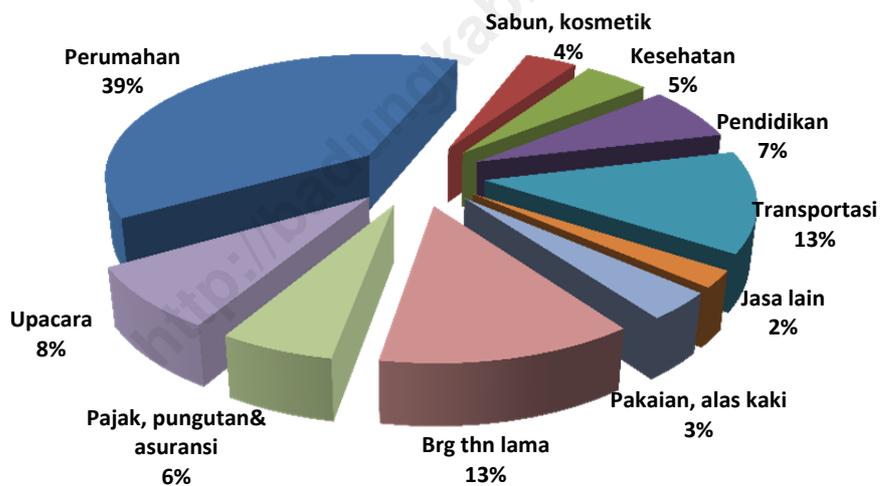
Selama enam tahun terakhir telah terjadi perubahan pada pola konsumsi penduduk Kabupaten Badung. Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk mengkonsumsi padi-padian menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 proporsi pengeluaran untuk konsumsi jenis komoditi ini menempati urutan pertama sebesar 22,14% dan terus menurun menjadi 12,76% pada tahun 2011. Sebaliknya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi cenderung terus meningkat meski mengalami sedikit penurunan di tahun 2011. Peningkatan pengeluaran untuk konsumsi jenis komoditi ini sering menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk secara makro. Namun sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan proporsi pengeluaran untuk konsumsi sumber-sumber protein hewani yang justru menunjukkan kecenderungan penurunan dari 21,19% pada tahun 2006 menjadi hanya 17,52% pada tahun 2011. Di sisi lain juga terjadi penurunan proporsi pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih dari 9,95% pada tahun 2006 menjadi 7,52% pada tahun 2011. Hal ini cukup menggembirakan karena ditengarai penduduk mulai sadar akan bahaya rokok dan tembakau sehingga mulai mengurangi konsumsinya.

7.2.2. Pola Konsumsi Non Makanan

Sama seperti halnya konsumsi bahan makanan, pola konsumsi non makanan juga digunakan untuk melihat preferensi konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi non makanan dapat diklasifikasikan menjadi 10 jenis yaitu pengeluaran untuk keperluan perumahan, sabun dan kosmetik, kesehatan, pendidikan, transportasi, jasa-jasa, pakaian dan alas kaki, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta biaya upacara adat

dan agama. Pada tahun 2011, pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitasnya masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran untuk non makanan yaitu mencapai rata-rata Rp. 242,1 ribu perkapita per bulan atau sekitar 39,22% dari total pengeluaran non makanan. Sementara itu pengeluaran untuk kebutuhan transportasi penduduk juga masih cukup besar mencapai Rp. 80,1 ribu perkapita per bulan atau sekitar 12,98%. Namun rupanya pendidikan dan kesehatan belum menjadi prioritas dalam pengeluaran penduduk. Hal ini diketahui dari rendahnya proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu hanya sekitar 4,68% untuk kesehatan dan 6,92% untuk pendidikan. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi barang tahan lama yang mencapai 12,88%.

Gambar 22.
Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Untuk Kelompok Non Makanan, 2011



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Seperti juga halnya konsumsi makanan, pola konsumsi non makanan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meski demikian proporsi pengeluaran untuk perumahan lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu mencapai 39,91% dibandingkan dengan daerah perdesaan yang hanya 35,34%. Hal ini dimungkinkan karena harga rumah di daerah perkotaan tentunya lebih mahal jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Perbedaan jarak dari satu tempat ke tempat lain berimbas pada perbedaan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan transportasi. Di daerah perdesaan, kebutuhan untuk transportasi mencapai 15,65% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 12,51%.

Tabel 9. Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2011

Jenis Komoditi	Nominal (000 Rp)			Persentase		
	K	D	K+D	K	D	K+D
Perumahan	256.4	179.0	242.1	39.91	35.34	39.22
Sabun, kosmetik	24.3	17.2	23.0	3.79	3.41	3.73
Kesehatan	31.0	19.4	28.9	4.83	3.82	4.68
Pendidikan	46.0	28.5	42.7	7.16	5.62	6.92
Transportasi	80.3	79.2	80.1	12.51	15.65	12.98
Jasa lain	15.6	4.1	13.5	2.43	0.81	2.18
Pakaian, alas kaki	23.1	17.1	22.0	3.60	3.38	3.56
Brg thn lama	81.6	70.5	79.5	12.70	13.92	12.88
Pajak, pungutan, asuransi	39.1	21.0	35.7	6.09	4.14	5.79
Upacara	45.0	70.5	49.7	7.00	13.92	8.05
Total	642.4	506.5	617.3	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Sementara itu penduduk di daerah perdesaan juga cenderung sedikit lebih konsumtif terhadap barang-barang tahan lama. Hal ini dapat dilihat dari tingginya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan ini yang mencapai 13,92% dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya 12,70%. Hal lain yang juga menarik adalah lebih tingginya proporsi pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini bukan karena masyarakat di daerah perdesaan kurang menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan melainkan harga untuk jasa pendidikan dan kesehatan lebih mahal di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Tabel 10. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Untuk Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi, 2006, 2009 dan 2011

Jenis Komoditi	2006	2009	2011
Perumahan	49.22	44.82	39.22
Sabun, kosmetik	3.85	3.92	3.73
Kesehatan	3.87	4.70	4.68
Pendidikan	7.66	8.61	6.92
Transportasi	12.79	12.04	12.98
Jasa lain	1.17	0.50	2.18
Pakaian, alas kaki	3.08	3.66	3.56
Brg thn lama	3.48	8.40	12.88
Pajak, pungutan, asuransi	4.28	4.97	5.79
Upacara	10.61	8.37	8.05

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama enam tahun terakhir pola konsumsi non makanan tidak banyak mengalami perubahan. Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas penunjangnya masih menjadi bagian terbesar dari pengeluaran non

makanan meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pengeluaran untuk perumahan mencapai 49,22% pada tahun 2006 dan menurun secara signifikan menjadi 39,22% pada tahun 2011. Jenis komoditi yang justru mengalami perubahan di tahun 2011 adalah pengeluaran untuk barang tahan lama. Jenis pengeluaran ini mengalami peningkatan signifikan dari 3,485 pada tahun 2006 menjadi 8,40% pada tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 12,88% di tahun 2011.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB VIII

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Badung mencapai 554.574 jiwa yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Badung Selatan. Dilihat dari struktur umurnya, penduduk Kabupaten Badung tergolong *expansive*, artinya jumlah penduduk di kelompok umur muda masih cukup besar. Rasio ketergantungan sebesar 44 orang per 100 penduduk usia produktif.
2. Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2011 sebanyak 409,91 ribu orang sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 409,76 ribu orang. Namun peningkatan ini justru dibarengi dengan penurunan jumlah angkatan kerja dari 314,09 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 313,11 ribu orang pada tahun 2011. Jumlah pekerja juga mengalami penurunan dari 310,15 ribu orang menjadi 305,90 ribu orang. Sebaliknya jumlah penganggur justru meningkat dari 3,94 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 7,21 ribu orang pada tahun 2011.
3. Tenaga kerja di Kabupaten Badung yang didominasi oleh kaum laki-laki merupakan tenaga kerja terdidik dimana 56,38% diantaranya berijazah SLTA ke atas. Mereka terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa yang menjadi sektor andalan perekonomian Kabupaten Badung. Pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan jumlah pekerja formal yang cukup signifikan dari 141,2 ribu orang pada tahun 2010 menjadi 159,6 ribu orang pada tahun 2011.
4. Penganggur di Kabupaten Badung terkonsentrasi di kelompok umur muda yaitu 20-24 tahun. Yang menarik para penganggur di Kabupaten Badung juga merupakan pengangguran terdidik karena 88,09% diantaranya

berijazah SLTA atau lebih tinggi. Ini mengindikasikan adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

5. Pada tahun 2011, nilai IPM Kabupaten Badung sebesar 75,35, menduduki peringkat ke-2 diantara seluruh kabupaten/kota se-Bali. Namun kecepatan peningkatan nilai IPM (reduksi *shortfall*) di tahun 2011 ternyata mengalami penurunan dari 2,08 menjadi 1,32. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah untuk memfokuskan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur semata melainkan juga menekankan pada peningkatan kualitas hidup penduduknya.
6. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 cukup tinggi, mencapai 6,69% namun ternyata juga diikuti dengan peningkatan kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai *gini ratio* sebesar 0,3385. Hal ini perlu diwaspai oleh seluruh pihak terkait. Peningkatan kesenjangan pendapatan akan berimplikasi luas terhadap hal-hal lainnya seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan maupun kondisi keamanan. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
7. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengentasan kemiskinan ternyata membawa dampak positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kondisi penduduk miskin yang ditandai dengan penurunan angka indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
8. Secara umum, dilihat dari pola konsumsinya, penduduk Kabupaten Badung dapat dikatakan cukup sejahtera. Hal ini diindikasikan dari proporsi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan non makanan yang mencapai 60,71%, jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan makanan yang hanya 39,29%. Ini artinya preferensi pengeluaran penduduk Kabupaten Badung sudah bergeser dari pemenuhan kebutuhan makanan menjadi non makanan.

9. Selama beberapa tahun terakhir konsumsi makanan penduduk Kabupaten Badung lebih didominasi oleh konsumsi makanan jadi yang mencapai 39,51% dari total pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Sementara itu pemenuhan kebutuhan sumber protein juga mendapat porsi yang cukup besar yaitu mencapai 17,52% lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi beras dan umbi-umbian yang hanya sebesar 13,2%. Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara pola konsumsi makanan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan.
10. Konsumsi non makanan masih didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 39,22%. Sementara itu porsi pengeluaran untuk kebutuhan transportasi dan barang lama juga cukup besar yaitu 12,98% dan 12,88%.

DATA MENCERDASKAN BANGSA

<http://badungkab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG
Jl. Mulawarman No. 11 Denpasar 80111
Telp : (0361) 43 7519, Fax : (0361) 411887
E-mail : bps5103@bps.go.id